

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERKEBUNAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Alamat : Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Bupati Kampar Telp. 0762-7320068

BANGKINANG

RENCANA KERJA TAHUN 2025



BANGKINANG 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Bupati Kampar, Bangkinang, Riau 28412

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 800.1.1 / DPPKH/SET- PRE / 44**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PADA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses perencanaan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar perlu menunjuk/mengangkat Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 melalui keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;
- b. bahwa namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 tersebut pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5619);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1213);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Bupati Kampar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan Bidang Terkait serta memperhatikan serta mentaati semua peraturan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 13 MARET 2024

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR**


MARAHALIM, S.Pt

Pembina

NIP. 19761013 200501 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar di Bangkinang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kampar.

Nomor : 800.1.1 / DPPKH / SET- PRE / 44

Tanggal : 13 MARET 2024

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PADA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marahalim, S.Pt NIP. 197610132005011007	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2.	Idrus, SP NIP. 19680107 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Wakil Ketua
3.	Yudhi Ardianto, SP NIP. 19800531 200003 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Perencana	Sekretaris
4.	Nur'aini, SP, M.Si NIP. 19741123 200701 2 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Usaha Tani	Anggota
5.	Muhammad Ali, S.Pt NIP. 19750104 200605 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Peternakan	Anggota
6.	Helvizar, SP NIP. 19720824 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Usaha Perkebunan	Anggota
7.	drh.Taufiq Bahar NIP. 19821210 201102 1 001	Pembina (IV/a)	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR**

MARAHALIM, S.Pt

Pembina

NIP. 19761013 200501 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan hidayah Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang merupakan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025.

Renja memuat evaluasi program kegiatan tahun lalu, program kegiatan yang akan datang serta sumber dana dan jumlah dana yang dibutuhkan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, dalam skala prioritas serta dibutuhkan oleh masyarakat perkebunan dan peternak Kabupaten Kampar yang tersebar di Kecamatan. Renja juga sebagai hasil aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Kabupaten Kampar, merupakan bagian dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pada akhirnya sebagai kinerja pembangunan yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat perkebunan dan peternak.

Semoga Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta sebagai informasi program kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Bangkinang, 2024

Kepala Dinas Perkebunan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kampar



MARAHALIM, S.Pt

Pembina

NIP. 19761013 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB IV. PENUTUP.....	51

1.1. Latar Belakang

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menetapkan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1). Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan Pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Sistem Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk ; (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (pasal 2 ayat 4).

Rencana Kerja Tahunan tersebut merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berkesinambungan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis kegiatan-kegiatan, melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

2. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum Dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, yang merupakan sebagai dokumen rencana pembangunan 1 (satu) tahun. Kegiatan pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan 1 (satu) tahun di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap program dan kegiatan harus dilaksanakan terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat, serta berperan aktif memajukan pembangunan dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar, dalam aktifitas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya

untuk tetap memperhatikan faktor – faktor transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai awal terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Upaya memajukan sub sektor Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau guna menjawab semua tantangan pembangunan, dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat tani pekebun dan peternak serta sekaligus dapat meningkatkan sumber daya manusia, integrasi sapi sawit/karet, kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner, rehabilitasi perkebunan karet rakyat, peremajaan sawit rakyat, penyediaan bibit kelapa sawit subsidi, penyediaan bibit unggul lainnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun dan peternak. Dapat digambarkan perkembangan usaha pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2023 yakni :

**Tabel 1. Perkembangan Jenis Usaha Pembangunan Perkebunan Kabupaten Kampar
Dari Tahun 2019 s/d 2023**

No	Jenis Usaha	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Perkebunan Rakyat	320.494	2.774.289	320.553	2.946.561	387.485	2.823.247	380.226	2.521.615	398.977	2.754.855
2	Perkebunan besar Negara	39.671	282.928	48.787	307.305	35.744	231.140	37.658	727.768	36.889	752.208
3	Perkebunan besar swasta	130.449	1.599.356	145.993	1.599.356	152.350	741.787	149.561	2.234.251	149.561	2.201.578
	Jumlah	490.614	4.656.573	515.334	4.853.222	575.579	3.796.174	567.445	5.483.634	585.427	5.708.641

Tabel 2. Perkembangan Luas dan Produksi Perkebunan Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019 s/d 2023

No	Jenis Usaha	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Karet	93.367	69.952	93.402	76.734	78.641	63.155	53.790	53.798	52.438	79.761
2	Kelapa Sawit	417.697	4.609.719	417.760	4.774.798	492.963	3.731.208	509.945	5.428.005	529.097	5.627.042
3	Gambir	2.037	785	2.040	1.163	1.857	1.287	1.642	1.287	1.860	1.287
4	Kakao	335	44	335	44	335	45	285	50	284	50
5	Antan	1.839	451	1.798	483	1.784	480	1.784	494	1.748	501
	Jumlah	515.275	4.680.951	515.334	4.853.222	575.579	3.796.174	567.445	5.483.634	585.427	5.708.641

Tabel 3. Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Kampar dari Tahun 2019 s/d 2023

No	Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kerbau	14.309	14.420	14.621	11.631	10.158
2	Sapi Potong	28.755	28.461	29.001	31.177	29.300
3	Babi	2.455	2.270	2.635	2.967	2.576
4	Domba	1.408	1.064	1.593	2.456	1.512
5	Kambing	20.739	21.069	24.751	22.408	20.588
6	Ayam Buras	302.259	291.745	326.994	287.158	310.644
7	Ayam Ras Pedaging	13.256.272	13.521.397	18.113.705	18.184.000	18.184.000
8	Ayam Ras Petelur	328.630	197.300	226.000	80.200	80.200
9	Itik	20.621	21.633	29.584	17.078	21.828
10	Itik Manila	19.295	19.681	16.232	15.836	12.560

Tabel 4. Produksi Daging Dan Telur Kabupaten Kampar dari Tahun 2019 s/d 2023

No	Jenis Ternak	2019		2020		2021		2022		2023	
		Daging (Kg)	Telur (Kg)	Daging (Kg)	Telur (Kg)	Daging (Kg)	Telur (Kg)	Daging (Kg)	Telur (Kg)	Daging (Kg)	Telur (Kg)
1	Kerbau	1.523.978	-	1.006.892	-	1.294.319	-	1.285.650	-	1.058.213	-
2	Sapi Potong	2.118.670	-	994.720	-	1.337.658	-	1.680.238	-	1.467.438	-
3	Babi	42.018	-	17.113	-	21.514	-	84.332	-	87.371	-
4	Domba	2.046	-	3.525	-	3.748	-	13.026	-	12.916	-
5	Kambing	80.225	-	36.083	-	41.624	-	102.580	-	71.229	-
6	Ayam Buras	470.149	115.935	486.978	585.850	495.239	425.911	106.441	374.024	108.570	381.505
7	Ayam Ras Pedaging	3.637.877	-	3.941.528	-	4.271.347	-	8.794.500	-	8.970.390	-
8	Ayam Ras Petelur	45.017	2.213.936	226.250	4.775.533	219.000	3.312.373	49.198	1.175.453	50.182	1.198.962
9	Itik	30.071	106.665	17.328	158.207	15.420	219.346	11.569	126.622	11.812	129.155
10	Itik Manila	2.579	3.998	2.616	8.835	2.710	7.571	5.405	7.386	5.519	5.858

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5619);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1213);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;
34. Peraturan Bupati Kampar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar tahun 2025 adalah sebagai acuan pembangunan yang terencana selama satu tahun, dalam usaha perbaikan secara terus menerus pada berbagai aspek dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk perbaikan kinerja Aparatur dan kelembagaan. Hal ini untuk menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk merumuskan dan meningkatkan kinerja Aparatur dan Kelembagaan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, memberikan arah dan landasan bagi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan serta memaksimalkan hasil pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas dan fungsi. Disamping sebagai instrumen informasi kebijaksanaan dan strategis pembangunan sektor Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta media untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2025, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (RENJA) PD adalah penjabaran teknis operasional dari Rencana Strategis PD, tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, hal ini dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian renstra s/d tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan menggambarkan capaian Renja Tahunan, pengukuran kinerja didasari atas capaian indikator – indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluar (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik (barang atau jasa).
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang telah menunjukkan telah dicapai maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.

Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan capaian kinerja PD yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan yang tertuang didalam Renstra PD. Hal ini dapat dilihat dalam tabel target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (Target Renstra 2023 s/d 2026 dan realisasi capaian kinerja Renstra serta target dan realisasi tahun 2023) dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau dan APBN.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra PD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar tahun lalu dapat disampaikan antara lain :

1. Program / kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran (<90%) yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Program Penyuluhan Pertanian
 - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
 - Sub kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran (>90%) yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman.
 - Sub kegiatan Pemanfaatan SDG hewan/tanaman.
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak.
 - Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer.
 - Sub kegiatan Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan.
 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
 - Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah.
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - Sub kegiatan Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan dan komoditas perkebunan.
 - Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.
 - Sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.

- d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis.
 - Sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - Sub kegiatan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
 - Sub kegiatan Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan.
- e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - Sub kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

g. Program Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
 - Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - Sub kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa.
 - Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan disebabkan oleh dukungan dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan target kinerja.
 - b. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan disebabkan oleh terdapat Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit yang dianggarkan di Anggaran Perubahan dan Dana di transfer ke Kas Daerah pada Bulan Desember yang menyebabkan kegiatan yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit tidak dapat dilaksanakan.
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah dengan melakukan urutan skala prioritas PD dan pelayanan publik, melakukan koordinasi usulan program / kegiatan ke tingkat Provinsi Riau dan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Data – data hasil evaluasi hasil pelaksanaan dan realisasi Renja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Kampar**

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode Rekening	Urusan/bidang Urusan pemerintahan daerah dan program/Kegiatan	Indikator kinerja/program(outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Urusan Pilihan								
3 27	Bidang pertanian								
3 27 01	PROGRAM/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten							
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	0,00	4,00	4,00	100,00	8,00	50,00
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	0,00	2,00	2,00	100,00	4,00	50,00
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294,00	0,00	75,00	75,00	100,00	150,00	51,02
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,00	0,00	2,00	2,00	100,00	4,00	50,00
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	40,00	0,00	10,00	10,00	100,00	20,00	50,00
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 27 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	0,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	14,00	50,00
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120,00	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	60,00	50,00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	50,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSentase PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak yang Beredar	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer									
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	16.000,00	50,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain									
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	50,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSentase PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian									
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	50,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian									
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	40,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	20,00	50,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	50,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar merupakan Dinas yang mengelola urusan pilihan yang tidak mempunyai indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007. Namun untuk menentukan tolok ukur kinerja PD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan target capaian tingkat produksi perkebunan dan populasi ternak selama 5 (lima) tahunan.

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, dimana pelayanan publik terbagi 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Usaha Tani, Bidang Usaha Perkebunan, Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1. Bidang Usaha Tani

Pelayanan pada pembangunan perkebunan rakyat yaitu :

- a. Pola swadaya murni artinya pembangunan kebun dilakukan oleh petani dan keluarganya berdasarkan kemampuannya.
- b. Pola swadaya berbantuan adalah pembangunan kebun dilakukan petani dan keluarganya dan sebagian dbantu oleh pemerintah atau pihak lain.
- c. Pola berbantuan adalah pembangunan kebun dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah atau pihak lain.

Batasan usaha perkebunan rakyat adalah < 25 ha, selain itu juga melakukan pelayanan dan pembinaan pasca panen produksi perkebunan yang berkaitan usaha petani, kelompok tani dan koperasi.

Pelayanan Publik Bidang Usaha Tani, melakukan sosialisasi program kegiatan, mengikuti musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, melakukan verifikasi teknis dan Administrasi Lapangan, Melakukan penetapan penerima manfaat atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas, pembentukan

kelembagaan kelompok tani, penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan, melakukan pembinaan lapangan dan pasca panen.

2. Bidang Usaha Perkebunan

Melaksanakan pelayanan perusahaan perkebunan besar Negara maupun Swasta, pembinaan penangkar benih perkebunan, dan penanggulangan OPT (Organisasi Pengganggu Tanaman) perkebunan, secara umum pelayanan usaha perkebunan berkaitan dengan legalitas usaha perkebunan yaitu :

- a. IUP (Izin Usaha Perkebunan) >25 Ha.
- b. STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) <25 Ha.
- c. Penilaian Usaha Perkebunan Negara dan Swasta dalam rangka penetapan klasifikasi usaha kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Izin lembaga penangkar benih perkebunan.

Pelayanan Publik Bidang Usaha Perkebunan yaitu melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan berkaitan dengan legalitas Usaha Perkebunan Besar Negara dan Usaha Perkebunan Besar Swasta, Penangkar benih perkebunan dan penanggulan OPT (Organisasi Pengganggu Tanaman), Melakukan penilaian usaha perkebunan, melakukan pembinaan penangkar perkebunan, membuat rekomendasi teknis perkebunan, melakukann pembinaan dan pengawasan perusahaan perkebunan.

3. Bidang Peternakan

Melaksanakan pelayanan pengembangan produksi, perbibitan dan pengolahan pakan, pembinaan budidaya dan pengembangan ternak, pengembangan sumberdaya dan kelembagaan, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan, pembinaan produksi dan pengelolaan SDG serta pengembangan teknologi, perbibitan ternak dan pengembangan pakan ternak.
- b. Peningkatan, pembinaan budidaya, pengembangan ternak, peningkatan sumber daya dan kelembagaan peternakan dalam rangka peningkatan populasi dan mengembangkan rumpun/ galur ternak.
- c. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi, perbibitan ternak, pengembangan pakan ternak, pengawasan mutu, kegiatan budidaya ternak, peningkatan sumberdaya dan kelembagaan dibidang peternakan.

4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Melaksanakan pelayanan pengembangan serta peningkatan dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan perlindungan penyakit hewan (P4H), kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan serta Pengawasan Obat Hewan (POH), secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan (P4H).
- b. Pengembangan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan pelayanan kesehatan hewan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan serta Pengawasan Obat Hewan (POH).
- d. Pembinaan terhadap medik veteriner dan paramedik veteriner.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Kabupaten Kampar**

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU	Target Renstra OPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	-	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)									
			- Karet	85.998	87.718	89.472	91.262	79.761	87.718	89.472	91.262	
			- Sawit	4.800.998	4.897.018	4.994.958	5.094.857	5.627.042	4.897.018	4.994.958	5.094.857	
2	Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	-	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)									
			a. Kerbau	14.896	15.194	15.497	15.807	10.158	15.194	15.497	15.807	
			b. Sapi Potong	29.590	30.182	30.785	31.401	29.300	30.182	30.785	31.401	
			Persentase Penyakit Ternak yang Tertangani (%)	26%	27%	28%	29%	26%	27%	28%	29%	
			Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna (%)	35%	37%	39%	40%	35%	37%	39%	40%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1. Faktor Internal = Kekuatan (*Strenghts*)

- Eksistensi Kelembagaan yang kuat
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar merupakan organisasi yang mempunyai posisi tawar yang strategis untuk melakukan pengelolaan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik. Posisi ini merupakan kekuatan untuk menjadikan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kampar.
- Dukungan Pemimpin
Komitmen Pimpinan untuk menjadikan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagai organisasi yang berkompeten dalam pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Konsolidasi internal dengan berbagai bidang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta konsolidasi eksternal dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi merupakan langkah yang nyata dalam membangun kompetensi.
- Kualitas Sumber Daya Manusia
Kondisi Sumber Daya Manusia yang berpendidikan SLTA, D4, S1 dan S2 sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang akan memajukan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar.
- Dukungan *Stakeholders*
Perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta kelompok – kelompok tani kebun dan ternak yang ada di Kabupaten Kampar merupakan mitra pendukung keberhasilan kemajuan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar.

2.3.2. Faktor Internal = Kelemahan (*Weakneses*)

- Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung akan berpengaruh pada optimalisasi hasil, keterbatasan sarana dan prasarana unit pengolahan data, sarana transportasi bagi petugas serta sarana yang ada unit pelaksana teknis Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang berpengaruh pada capaian kinerja yang optimal.

- Penguasaan Teknologi

Pentingnya penguasaan teknologi bagi petani kebun dan ternak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil merupakan faktor yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak termasuk dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Bimbingan teknis berupa pembinaan dan penyuluhan merupakan cara yang dapat ditempuh dan cukup efisien untuk meningkatkan penguasaan teknologi.

- Permodalan

Jumlah ternak yang dipelihara masih jauh dari BEP (Break Event Point) sehingga keuntungan yang diperoleh juga tidak optimal. Sementara untuk menambah populasi tidak mempunyai modal.

- Informasi Pasar

Akses informasi pasar yang lemah mengakibatkan harga yang diterima petani kebun dan ternak cenderung dipermainkan. Untuk itu perlu diaktifkan kembali koperasi sebagai sentra pemasaran dan lebih aktif memantau informasi harga melalui media cetak/elektronik, bursa atau pameran/ekspo.

- Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan

Penanganan pengembangan budidaya tanaman perkebunan yang belum sesuai standar.

- Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan.

Belum optimal nya penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan.

- Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan.

Belum terjangkaunya seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kampar dalam Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) serta penanganan gangguan usaha perkebunan dan kebakaran lahan.

- Sertifikasi & pengawasan mutu benih.

Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih terhadap penangkar yang ada di Kabupaten Kampar.

2.3.3. Faktor Eksternal = Peluang (*Opportunities*)

- Meningkatnya Kebutuhan Produk Perkebunan dan Produk Asal Ternak yang Berkualitas.

Dalam era maju, masyarakat semakin sadar gizi sehingga kebutuhan produk bahan asal ternak yang berupa daging, telur, susu dari waktu ke waktu terus mengalami

peningkatan. Peningkatan permintaan ini dipicu oleh semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani yang berasal dari ternak dalam menjaga kesehatan dan kecerdasan. Demikian pula halnya dengan Kebutuhan Produk Perkebunan, dimana dari waktu ke waktu permintaan terhadap produk perkebunan semakin meningkat.

- Terbukanya Pangsa Pasar Untuk Produk Perkebunan, produk Asal Ternak Serta Produk Olahan Asal Ternak.

Di sektor agribisnis perkebunan maupun peternakan masing - masing pelaku usaha memiliki peluang dan pangsa pasar yang baik, pangsa pasar untuk produk perkebunan, produk asal ternak yang berupa daging, susu, telur untuk pemasaran lokal maupun regional masih terbuka lebar. Demikian pula untuk produk olahannya seperti aneka olahan telur, daging, susu yang memiliki pangsa pasar yang masih sangat terbuka.

- Peraturan Perundang – undangan

Tersedianya peraturan perundang – undangan yang mendukung mekanisme penyelenggaraan pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar.

- Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Peternakan

Merupakan peluang besar untuk memfasilitasi para pelaku agribisnis peternakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET), teknologi pakan dan pengolahan hasil ternak akan dapat meningkatkan produksi ternak dan hasil olahannya secara nyata. Teknologi ini perlu diterapkan dan terus disosialisasikan kepada para pelaku agribisnis peternakan.

- Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya yang sangat besar bagi perkembangan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan luas lahan perkebunan, populasi ternak dan ketersediaan pakan yang sangat besar, serta tersedianya komoditas Perkebunan dan Peternakan untuk pemenuhan pangan.

- Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif

Dukungan pemerintah yang sangat positif dalam investasi terhadap produk perkebunan sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

2.3.4. Faktor Eksternal = Ancaman (*Threats*)

- Kebijakan fiskal
Terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia dalam memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kampar.
- Kebijakan Moneter
Kebijakan Perbankan yang kurang berpihak kepada petani kebun dan peternak berdampak pada sulitnya para pelaku agribisnis perkebunan dan peternakan untuk mendapatkan bantuan kredit maupun penguatan modal. Keharusan adanya agunan bagi petani kebun dan peternak yang akan mengajukan kredit perbankan merupakan kendala yang cukup serius karena sebagian besar petani kebun maupun peternak tidak memiliki agunan kredit.
- Penegakan Hukum
Masih lemah penegakan hukum di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, diakibatkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha perkebunan dan peternakan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan masih terbatasnya peraturan pelaksana yang menjadi pegangan aparatur dalam menjalankan tugasnya.
- Persaingan produk
Semakin tingginya persaingan kualitas/mutu produk perkebunan maupun peternakan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
- Fluktuasi Harga
Produk perkebunan maupun peternakan memiliki fluktuasi harga yang cukup signifikan. Fluktuasi ini disebabkan pengaruh supply dan demand produk tersebut. Di saat produk melimpah yaitu pada saat panen, harga akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Jika supply produk kurang sedangkan permintaan besar maka harga akan mengalami kenaikan. Harga akan stabil jika petani dan peternak dapat memprogram produk agar tidak over di pasaran tetapi juga tidak sampai pasar kekurangan stok.
- Serangan Penyakit
Penyakit AI (Avian Influenza) yang menyerang unggas, serta menyebabkan merosotnya produk asal ternak ayam yang berupa telur maupun daging. Penyakit ternak yang berdampak cukup besar seperti Jembrana, Brucellosis dan Anthrax yang menyerang ternak sapi juga menimbulkan kerugian bagi pengusaha / petani ternak.

- Lemahnya Kelembagaan Kelompok Tani
Kelembagaan Kelompok Tani Kebun dan Ternak sebagian besar masih lemah, organisasi yang telah dibentuk dan berjalan kurang terkoordinasi, banyak kelemahan didalam pendokumentasian kegiatan organisasinya. Kegiatan - kegiatan yang perlu dicatat / didokumentasikan banyak tidak dilaksanakan pencatatan sehingga kemajuan yang dicapai tidak terbaca dengan jelas.
- Produksi/Produktivitas perkebunan masih rendah
Masih rendahnya produksi/produktivitas hasil perkebunan terutama pada sektor petani swadaya murni yang merupakan sektor terbesar bila dibandingkan dengan sektor perkebunan besar swasta maupun perkebunan besar negara.
- Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan
Tingginya persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan perkebunan baru yang semakin terbatas antar sesama petani / pengusaha yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan secara illegal.
- Pencemaran Lingkungan
Meningkatnya pencemaran lingkungan bagi usaha peternakan.
- Wabah Penyakit Hewan Menular
Kemungkinan munculnya wabah penyakit hewan menular.

2.3.5. Analisis Strategis

Berdasarkan hasil analisa lingkungan faktor internal dan eksternal, maka ditetapkan strategi pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut :

1. Strategi (*Strenghts-Opportunities*)

Strategi pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kekuatan (*Strenghts*) dan Peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut :

- Pemantapan kelembagaan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
- Pengkajian dan Penerapan teknologi perkebunan dan peternakan yang mampu mengoptimalkan peningkatan produksi dan produktifitas hasil perkebunan serta peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak.

2. Strategi (*Weakneses-Opportunities*)

Strategi pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kelemahan (*Weakneses*) dan Peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut :

- Pemberdayaan sumberdaya manusia petani kebun maupun peternak;
- Peningkatan pengawasan bahan asal hewan (BAH);
- Pengembangan Sumberdaya Aparatur Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang peka terhadap perkembangan informasi perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

3. Strategi (*Strenghts-Threats*)

Strategi pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kekuatan (*Strenghts*) dan Ancaman (*Threats*) adalah sebagai berikut :

- Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan untuk keamanan berusaha;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- Peningkatan pengawasan bahan asal hewan (BAH).

4. Strategi (*Weakneses-Threats*)

Strategi pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil analisis Kelemahan (*Weakneses*) dan Ancaman (*Threats*) adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Penguatan kelembagaan kelompok tani;
- Pengembangan permodalan petani kebun maupun peternak;
- Pengembangan jaringan informasi pasar produk hasil perkebunan dan peternakan;
- Pemberdayaan pelaku usaha perkebunan maupun peternakan terhadap pengendalian lingkungan;
- Peningkatan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) serta penanganan gangguan usaha perkebunan dan kebakaran lahan serta pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- Pemetaan potensi perkebunan maupun peternakan dalam rangka pengembangan kawasan produksi perkebunan maupu peternakan.

2.3.6. Isu Strategis Pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan peternakan.

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perkebunan dan peternakan yaitu penerapan teknologi budidaya yang baik, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi), penyediaan benih unggul bermutu, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, menyediakan dan memperbaiki infrastruktur (jalan produksi, jaringan tata air) pada sentra produksi komoditas perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian, penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida), penyediaan bibit ternak unggul serta peningkatan pembibitan dan perawatan ternak.

2. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan peternakan serta akses terhadap informasi pasar.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk perkebunan maupun peternakan, maka strategi difokuskan pada pengembangan unit pengolahan produk petani, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan dan peternakan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan perkebunan dan peternakan, meningkatkan mutu hasil produk perkebunan dan peternakan melalui pembinaan petani dan pelaku usaha agribisnis.

3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan dan peternakan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dan peternakan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dan peternakan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Strategi yang akan ditempuh meliputi :

- Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani pekebun dan peternak serta petugas/aparatur perkebunan maupun peternakan melalui pelatihan petani dan aparatur perkebunan maupun peternakan.
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
4. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dan peternakan.
- Strategi untuk meningkatkan penerapan teknologi pertanian (alat-alat pertanian, benih unggul, teknik budidaya dan lain-lain) adalah dengan meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani/pekebun agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih banyak, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET), teknologi pakan dan pengolahan hasil ternak akan dapat meningkatkan produksi ternak dan hasil olahannya secara nyata. Teknologi ini perlu diterapkan dan terus disosialisasikan kepada para pelaku agribisnis peternakan.
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan dan bahan asal ternak.
- Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya. Untuk mendukung ketersediaan pangan yang berasal dari perkebunan dan bahan asal ternak, maka strateginya adalah mengembangkan komoditi perkebunan maupun peternakan sebagai sumber bahan pangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan RKPD Kabupaten Kampar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Kampar yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel dibawah ini :

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kampar

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	147.889.128	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	147.889.128
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2,00	12.500.820	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2,00	12.500.820
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64,00	9.214.980.956	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64,00	9.214.980.956
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00	2.977.908	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00	2.977.908
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	17.089.560	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	17.089.560
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	160.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	160.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor	1,00	99.900.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor	1,00	99.900.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	69.847.065	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	69.847.065

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10,00	91.036.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10,00	91.036.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	240.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,00	240.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3,00	500.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0,00	0
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Kampar	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1,00	144.021.180	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1,00	144.021.180
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang	1,00	962.596.804	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang	1,00	962.596.804
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kampar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00	195.486.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00	195.486.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00	29.082.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00	29.082.000
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelola Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelola Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Kabupaten Kampar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,00	235.769.700	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,00	235.769.700
	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Kabupaten Kampar	Jumlah Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1,00	300.000.000	Jumlah Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1,00	300.000.000
	Peningkatan Mutu dan Pederahan Benih/Bibit Ternak Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pederahan Benih/Bibit Ternak Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pederahan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		

	Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Kabupaten Kampar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1,00	50.040.300	Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Kabupaten Kampar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1,00	50.040.300
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		
	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Kabupaten Kampar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1,00	42.628.499	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Kabupaten Kampar	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1,00	42.628.499
	Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Kabupaten Kampar	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar	1,00	400.000.000	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Kabupaten Kampar	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar	1,00	400.000.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	Kabupaten Kampar	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	Kabupaten Kampar	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian			Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2,00	250.000.000	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2,00	250.000.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian			Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian		
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Kabupaten Kampar	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4,00	1.000.000.000	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Kabupaten Kampar	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0,00	0
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Kampar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang Dikendalikan	125,00	50.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Kampar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang Dikendalikan	125,00	50.000.000
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Kampar	Jumlah Luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	375,00	50.000.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten Kampar	Jumlah Luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	375,00	50.000.000
PROGRAM PENGIZINAN USAHA PERTANIAN		PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN			PROGRAM PENGIZINAN USAHA PERTANIAN		PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1,00	804.578.246	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1,00	804.578.246
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PERSENTASE PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PERSENTASE PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Kampar	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5,00	635.242.729	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Kampar	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5,00	635.242.729
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Kampar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5,00	4.143.054.404	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Kampar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5,00	4.143.054.404
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2,00	200.000.000	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0,00	0
				20.611.976.428					18.911.976.428

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses dan program kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar mengacu pada hasil proses musrenbang kecamatan, Forum PD, Pramusrenbang Kabupaten, Musrenbang Kabupaten, Pramusrenbang Propinsi, Musrenbang Propinsi, Pramusrenbang Kementan, dan Musrenbang Kementan, Pada inti penampungan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dengan mewujudkan kebutuhan dalam skala prioritas, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengikuti, diskusi, tanya jawab, dan mengakomodir usulan yang disampaikan oleh Desa, pemuka masyarakat.
2. Menindaklanjuti hasil musrenbang kecamatan dengan melakukan peninjauan teknis awal lapangan, hasilnya merupakan skala prioritas wilayah yang disampaikan ke Dinas Kabupaten.
3. Verifikasi dilakukan oleh tim Dinas Kabupaten dengan Melibatkan Pemerintahan setempat, dengan melakukan peninjauan lokasi, pengambilan titik koordinat, dan layak teknis, dilanjutkan pertemuan calon penerima, dan penetapan lokasi dan penerima manfaat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas.
4. Penetapan program dan kegiatan adalah skala prioritas berdasarkan layak teknis dan layak administrasi dengan sumber dana APBD Kabupaten Kampar.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dikumpulkan lewat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kampar (Musrenbangcam) setiap tahunnya, dan untuk tahun 2025 Program dan Kegiatan dikumpulkan dari Musrenbangcam Tahun 2024. Pada tabel 3 berikut usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan untuk tahun 2025 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagaimana tabel 4 berikut :

Nº	ID USULAN	TANGGAL USU'	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
1	1099283	22-01-2024	HELMAN SADRI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Akses jalan ke perkebunan masyarakat yang sudah rusak sehingga menyebabkan sulitnya petani membawa keluar hasil perkebunan mereka.	Dusun I dan Dusun III Desa Muara Takus, Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Muara Takus
2	1064803	19-01-2024	KHAIRUL SYAFRI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	AKSES JALAN PRODUKSI SANGAT DIBUTUHKAN	DUSUN II SEI PUTIH, Kab. Kampar	Tambang	Kualu Nenas
3	1026240	17-01-2024	ARJUNALIS	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Akses jalan rusak dan berlobang	Jl. Bariamin Dusun II Pincuran Gading, Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Koto Mesjid
4	1136052	23-01-2024	KHAIRUL AMRI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Apabila Musim Hujan Jalan Menuju Kebun Masyarakat tidak bisa dilewati	Desa Batu Langka Kecil, Kab. Kampar	Kuok	Batulangka Kecil
5	1083591	20-01-2024	MHD. TOHA	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Banjir sehingga bahu jalan sebelah kanan dan kiri mengakibatkan banjir bagi rumah disekitarnya	Desa Lereng, Kab. Kampar	Kuok	Lereng
6	984485	15-01-2024	MAWARDI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	banyak jalan akses menuju perkebunan masyarakat yang belum memadai	desa sipungguk, Kab. Kampar	Salo	Sepungguk
7	1098272	22-01-2024	DEFRI YUNENDRA	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	banyaknya warga yang melewati untuk pergi bekerja	Dusun Simpang Pawuo, Kab. Kampar	Kuok	Pulau Terap
8	1029173	17-01-2024	NASRULLAH	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	buruknya akses jalan antar pemukiman	dusun IV dan Dusun VII , Kab. Kampar	Koto Kampar Hulu	Tanjung
9	1084324	21-01-2024	WILTA WANTRI, S.Pd	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Dibutuhkan pembangunan jalan produksi ke kebun masyarakat	Desa Kota Lama, Kab. Kampar	Kampar Kiri Hulu	Koto Lama
10	1084321	21-01-2024	ANDRI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Dibutuhkan pembangunan jalan produksi sepanjang 8.000 M	Desa Dua Sepakat, Kab. Kampar	Kampar Kiri Hulu	Dua Sepakat
11	1001349	16-01-2024	ZULPAN ALWI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	DRENASENYA YANG SUDAH HANCUR DAN BANYAKNYA KAYU	DUSUN IV , Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Tanjung Alai
12	983023	15-01-2024	ULI HADIRUN	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan Berlobang, saat hujan jalan becek dan sangat sulit dilewati sehingga dikategorikan jalan tidak layak	Dusun 3, Kab. Kampar, Kab. Kampar	Tapung	Patahapan Jaya

13	1002152	16-01-2024	Yusry Erwin	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan menuju akses perkebunan masyarakat rusak parah dan diperlukan jalan produksi sepanjang 5 KM	Pangkalan baru, Kab. Kampar	Siak Hulu	Pangkalan Baru
14	1097543	22-01-2024	ARSYAD	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan menuju akses perkebunan masyarakat rusak parah dan diperlukan jalan produksi sepanjang 4 KM	Dusun II, Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Koto Tuo Barat
15	1098183	22-01-2024	MUHAMMAD UJUD	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan menuju Desa Rantau Kasih yang menghubungkan ke Kabupaten Pelalawan sangat parah dan kami mengusulkan untuk pembangunan badan jalan baik pengerasan maupun pengaspalannya	Balung, Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Balung
16	1064644	19-01-2024	AJISMAN	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	JALAN PERKEBUNAN WARGA YANG TIDAK LAYAK DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KARENA AKSES JALAN INI DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MENGAMBIL HASIL PRODUKSI DARI ALAM	Desa Rantau Kasih, Kab. Kampar	Kampar Kiri Hilir	Rantau Kasih
17	985414	15-01-2024	ZULPAN ALWI	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan Produksi Di Dusun Karya Nyata belum maksimal dan perlu dilakukan perbaikan sepanjang 3 Kilometer	DUSUM I, DUSUN II DAN DUSUN III, Kab. Kampar	XIII Koto Kampar	Tanjung Alai
18	1159765	24-01-2024	TARMO, S.Pd	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan usaha tani Dusun IV Lading Tinggal menuju Dusun I Senama Nenek yang juga merupakan jalan usaha tani kebun kelapa sawit masyarakat Desa Senama Nenek	Dusun Karya Nyata Desa Siabu, Kab. Kampar	Salo	Siabu
19	1042221	18-01-2024	ABDOEL RAKHMAN CHAN	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan utama menuju Desa Gading Permai masih jalan tanah sehingga jika musim hujan masyarakat sangat sulit untuk melewatinya dan sering mobil terpuruk karena licin dan berlumpur	Dusun IV Lading Tinggal, Kab. Kampar	Tapung Hulu	Senama Nenek
20	1056934	19-01-2024	AZRIDA	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	JALAN YANG ADA DI DESA, BAHU JALAN NYA BELUM MEMADAI	Desa Gading Permai, Kab. Kampar	Kampar Kiri Hilir	Gading Permai
21	974458	15-01-2024	H.Nazaruddin, SE	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jalan yang ada terlalu jauh untuk ditepmu, berakibat kurang efisiensi waktu Sehingga perlu dibuat jalan baru yg lebih efisien	(PANJANG 1 KM), DESA BINUANG, Kab. Kampar	Bangkinang	Binuang
22	990890	16-01-2024	DASMAN	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter		Jalan produksi tanah khas desa (TKD), Kab. Kampar	Kampar Utara	Kayu Aro

23	1073053	19-01-2024	ARMUS	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Jika musim penghujan, jalan berlumpur dan Rusak Parah	Dusun II Harapan Jaya RT.001 dan RT.002 RW.001, Kab. Kampar	Tapung Hulu	Kusau Makmur
24	1049211	18-01-2024	Muhammad Jaddid Rambe	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Lebar jalan tidak memadai disaat mobil berselisihan	JALAN POROS ASPAL PENGHUBUNG ANTAR DESA, Kab. Kampar	Tapung Hilir	Kijang Makmur
25	1008386	16-01-2024	Sumiran, SE	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	mengingat parit di jalan utama Desa Bukit Payung mengalami pendangkalan maka perlu dilakukan normalisasi parit.	Desa Bukit Payung, Kab. Kampar	Bangkinang	Bukitpayung
26	995687	16-01-2024	EDI WIRNATA	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	merupakan jalan utama dusun menghubungkan antara desa sawah dan desa kampung panjang	Dusun pulau tengah, pinggir sungai kampar, Kab. Kampar	Kampar Utara	Sawah
27	1098626	22-01-2024	MUKIONO	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	PEMBANGUNAN BAHU JALAN (PELEBARAN JALAN) JALAN POROS DESA SUKA MAJU, KARENA KONDISI LEBAR JALAN TIDAK MEMNUHI STANDAR LEBAR JALAN POROS	JALAN POROS DESA SUKA MAJU, Kab. Kampar	Tapung Hilir	Suka Maju
28	1051741	18-01-2024	YARNO ARSYID	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Pembangunan Jalan Sepanjang 300 M	Dusun V Batu Belah RT 003 RW 002, Kab. Kampar	Kampar	Batu Belah
29	1064361	19-01-2024	MAS'ADI, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Penahan badan aspal yg sudah ada	Dusun 1 Alampanjang, Kab. Kampar	Rumbio Jaya	Alam Panjang
30	1064131	19-01-2024	LIMASNUR, SOS.I	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Pengerasan Jalan Usaha Tani Rt 02 Rw 01 Dusun IV Karangan Tinggi sepanjang 2.000 meter	Rt 02 Rw 01 Dusun IV Karangan Tinggi, Kab. Kampar	Tambang	Kuapan
31	1064232	19-01-2024	LIMASNUR, SOS.I	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Pengerasan Jalan Usaha Tani Rt 04 Rw 02 Dusun I Kuapan sepanjang 2.000 meter	Jalan Usaha Tani Rt 04 Rw 02 Dusun I Kuapan, Kab. Kampar	Tambang	Kuapan
32	1009812	16-01-2024	HERI YUSIFER	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Peningkatan Usaha Ekonomi Desa	Dusun 1 Panglimo Khatib Desa Simpang Kubu, Kab. Kampar	Kampar	Simpang Kubu
33	1056860	19-01-2024	Marzai	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Sepanjang 6 KM Jalan utama Desa Sungai Bungo menuju Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Hilir rusak parah (becek berkubang) karena belum diaspal dan status jalan tersebut adalah jalan Pemda Kampar	Jalan Lintas Sungai Bungo, Gading Permai dan Bangun Sari, Kab. Kampar	Kampar Kiri Hilir	Sungai Bungo
34	1027720	17-01-2024	SUBIANTO	Pembangunan Jalan Produksi, Lebar jalan 4 meter, bahu jalan pada kiri dan kanan 0,5 meter, dan parit pada kiri kanan 1 meter	Sulitnya jalan produksi desa yang berdampak pada ekonomi masyarakat.	Sepanjang Jalan Poros Desa Indrapuri dan Jalan Anggrek IX RT/RW 009/006 Desa Indrapuri, Kab. Kampar	Tapung	Indrapuri

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Kampar kedepan harus sejalan dengan program dan kebijakan Nasional dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta program Provinsi Riau.

Adapun Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025 pada Kementerian Pertanian dalam pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Pangan

- Pengolahan hasil sentra produksi , stabilisasi/kepastian harga komoditas primer dan informasi pasar/market intelegent, penyediaan terminal agribisnis.
- Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
- Peningkatan diversifikasi pangan.
- Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.

- Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan produksi) terutama di sentra produksi tebu dan kapas, pembuatan sumur resapan, sumur dalam dan dangkal, embung, pengadaan pompa air, sprinkle, pencetakan lahan tebu dan kapas serta pengadaan traktor, pengadaan pupuk dan inventasi.

Sedangkan misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

1. Memperkuat dan memantapkan jaringan infrastruktur.

- Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan produksi) terutama di sentra produksi tebu dan kapas, pembuatan sumur resapan, sumur dalam dan dangkal, embung, pengadaan pompa air, sprinkle, pencetakan lahan tebu dan kapas serta pengadaan traktor, pengadaan pupuk dan inventasi.
- 2. Menurunkan angka kemiskinan
 - Peningkatan pendapatan keluarga petani.
- 3. Peningkatan daya saing perekonomian.
 - Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
 - Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan produksi perkebunan dan Peternakan
2. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3. Meningkatnya pemasaran hasil peternakan
4. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan dan peternakan
5. Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan pada kelompok tani
6. Meningkatnya penguasaan teknologi peternakan tepat guna oleh peternak
7. Meningkatnya ketahanan pangan
8. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak yang cukup baik kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya serta pencegahan penyakit menular ternak

3.2.2. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan dan Peternakan
2. Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3. Meningkatnya pendapatan peternak
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan petani
5. Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi perkebunan
6. Terwujudnya penguasaan Teknologi peternakan berkembang dan bermanfaat dalam usaha peternakan
7. Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan

8. Terwujudnya ketersediaan pangan asal ternak yang cukup baik kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya serta pencegahan penyakit menular ternak

Hubungan Isu, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.

No	ISU	TUJUAN	SASARAN	KET
1	Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produksi perkebunan dan Peternakan	Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan dan Peternakan	
2	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan peternakan serta akses terhadap informasi pasar.	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
		Meningkatnya pemasaran hasil peternakan	Meningkatnya pendapatan peternak	
3	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan dan peternakan	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan dan peternakan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan petani	
4	Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dan peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan pada kelompok tani	Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi perkebunan	
		Meningkatnya penguasaan teknologi peternakan tepat guna oleh peternak	Terwujudnya penguasaan Teknologi peternakan berkembang dan bermanfaat dalam usaha peternakan	
5	Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan dan bahan asal ternak	Meningkatnya ketahanan pangan	Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan	
		Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak yang cukup baik kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya serta pencegahan penyakit menular ternak	Terwujudnya ketersediaan pangan asal ternak yang cukup baik kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya serta pencegahan penyakit menular ternak	

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program untuk tiga tahun kedepan (2023-2026) penyusunan program pembangunan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kampar akan selalu berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar serta mengacu pada program pembangunan pertanian Nasional dan program Pemerintah Kabupaten Kampar, program pembangunan peternakan di Kampar terdiri dari:

- (1) **Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- (2) **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

- (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
- (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner**
- (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
- (6) Program Perizinan Usaha Pertanian**
- (7) Program Penyuluhan Pertanian**

3.3.1. Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.3.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - b. Pemanfaatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 - a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijuan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain
 - a. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

3.3.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.3.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - a. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha

3.3.5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3.3.6. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

3.3.7. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Kampar
Tahun 2025

Unit Organisasi : 3.27.0.0.0.00.02.0000 DINAS PERKUBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.0.0.0.02.0000 DINAS PERKUBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	keluaran Sub Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3		DINAS PERKUBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3 27 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
3 27 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	6 Dokumen	147.889.128,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	216.084.814,00	
3 27 01 2 01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	6 Dokumen	12.500.820,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.750.902,00	
3 27 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
3 27 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	64 Orang/bulan	2 Laporan	9.214.980.956,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	10.015.760.511,00	
3 27 01 2 02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	2.977.908,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.275.698,00	
3 27 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
3 27 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	17.089.560,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.798.516,00	
3 27 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	197.297.271,00	
3 27 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	99.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.890.000,00	
3 27 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	69.847.065,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76.831.771,00	

3	27	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	155.139.600,00	
3	27	01	2	06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	473.000.000,00	
3	27	01	2	07	0002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	700.000.000,00	
3	27	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	158.423.298,00	
3	27	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.058.856.484,00	
3	27	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215.034.600,00	
3	27	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	30 Unit	31.990.200,00	
3	27	02	2	02	0002	Pengadaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	314.346.670,00	
3	27	02	2	02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	575.772.530,00	

[illegible]

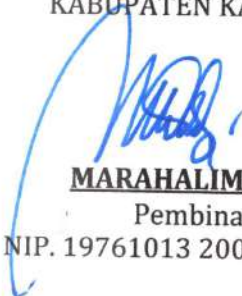
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran sumber dana program kegiatan tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen penuh dari Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar beserta segenap jajaran staf untuk diimplementasikan dengan baik guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar merupakan perwujudan perencanaan serta terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.

Rencana Kerja Tahunan ini juga berperan sebagai alat kendali/perencanaan, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong tercapainya sasaran pembangunan perkebunan Kabupaten Kampar Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat, dengan harapan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang, atas kepedulian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN,
PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR



MARAHALIM, S.Pt

Pembina

NIP. 19761013 200501 1 007

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK
KABUPATEN KAMPAR**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalamnya dihaturkan ke hadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan KaruniaNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam dengan ucapan *Allahumma sholli 'ala Muhammad wasallim wabarik 'alaihi* dihadiahkan kepada rahmatan lil 'alamin, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari penjabaran lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini memiliki peranan penting karena merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi suatu keharusan karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.

Penyusunan Renja Tahun 2025 membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat selama penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Bangkinang, April 2024



KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL

ENDI ZULHAIRI, M.Si

Kepala Dinas Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730304 199201 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	46
3.3. Program dan Kegiatan	48
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V. PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Rekomendasi	62
5.3. Kaidah Pelaksanaan	63
5.4. Rencana Tindak Lanjut	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Bulan Desember 2023	11
Tabel 2 (Tabel T-C. 29) Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten Kampar Tahun 2023	19
Tabel 3 (Tabel T-C. 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	24
Tabel 4 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi yang RAT di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023	26
Tabel 5 Perkembangan Modal Usaha, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 s/d 2023	26
Tabel 6 UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023	26
Tabel 7 Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023	27
Tabel 8 Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023	27
Tabel 9 Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM / LPG Bersubsidi Tahun 2020 s/d 2023	28
Tabel 10 Matriks SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>)	31
Tabel 11 (Tabel T-C. 31) Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar	34
Tabel 12 (Tabel T-C. 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar	43
Tabel 13 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD	45
Tabel 14 Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	47
Tabel 15 (Tabel T-C. 33) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2024	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga teknis yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan UMK. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan di tiap perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 yang disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus pada pelayanan masyarakat di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK.

Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapannya.

Perlu dicermati bahwa sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, RENJA sebagai komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan khususnya dalam pengembangan atau pelayanan di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Kampar.

Ada beberapa prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025, yaitu :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2023-2026 dan berpedoman pada RPJMD 2023-2026. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai

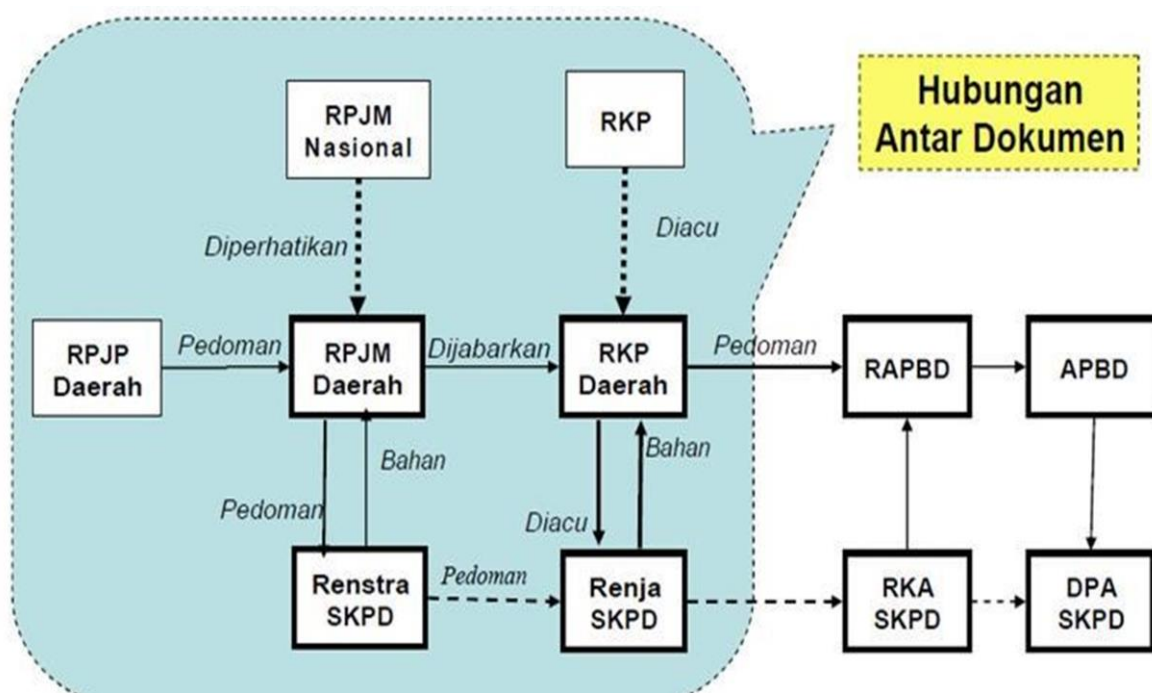
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan APBD Kabupaten Kampar. Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja dilakukan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja.
 - b. Orientasi mengenai Renja.
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja.
 - d. Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
3. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - a. Pengolahan data dan informasi.
 - b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas.
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
 - e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD.
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran.
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
 - h. Perumusan kegiatan prioritas.
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - k. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja.
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan Renja.

Mencermati prinsip dan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan sekaligus proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut.

Gambar 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berdasarkan pedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan pedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kampar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah sejalan dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).
 27. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
 28. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
 29. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 ;
 30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
3. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pencapaian visi dan misi;
4. RENJA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan perbandingan target kinerja antara tahun lalu dan tahun yang akan datang. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 (tahun berjalan*) dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan di masa sebelumnya dan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan kinerja dinas / instansi lain yang sejenisnya.

Kegiatan Tahun 2023 posisi sampai dengan bulan Desember yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), yang pencapaian fisiknya di atas 90% atau yang mencapai target 100% sebanyak 31 sub kegiatan, yang capaian penyelesaian fisiknya di bawah 90% sebanyak 4 sub kegiatan dan yang di bawah 50% terdapat 2 sub kegiatan.
2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan 90% s/d 100% sebanyak 31 sub kegiatan, yang penyerapannya di bawah 90% sebanyak 4 sub kegiatan dan di bawah 50% terdapat 2 sub kegiatan.

Lebih jelasnya hasil kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Desember dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

TABEL 2.1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

BULAN DESEMBER 2023

PAGU ANGGARAN	:	10,958,090,103											
JUMLAH PROGRAM	:	10 Program											
JUMLAH KEGIATAN	:	20 Kegiatan											
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	37 Sub Kegiatan											
REALISASI FISIK	:	88.23											
REALISASI KEUANGAN	:	88.23											

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN						PROGRES FISIK			PERMASA LAHAN
				TARGET		REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		TARGET	REALISASI	ERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13=12*4/100	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343,990,100											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272,950,100	2.49	272,950,100	2.49	243,503,690	89.21	243,503,690	89.21	100.00	89.21	2.22	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,440,000	0.46	50,440,000	0.46	49,034,000	97.21	49,034,000	97.21	100.00	97.21	0.45	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,600,000	0.19	20,600,000	0.19	20,598,000	99.99	20,598,000	99.99	100	100	0.19	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,852,686,341											
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,819,205,341	34.85	3,819,205,341	34.85	3,658,975,241	95.80	3,658,975,241	95.80	100.00	95.80	33.39	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,481,000	0.31	33,481,000	0.31	33,481,000	100.00	33,481,000	100.00	100.00	100.00	0.31	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	985,548,740											
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	28,746,000	0.26	28,746,000	0.26	28,746,000	100.00	28,746,000	100.00	100.00	100.00	0.26	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351,348,140	3.21	351,348,140	3.21	350,848,140	99.86	350,848,140	99.86	100.00	99.86	3.20	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,878,500	0.80	87,878,500	0.80	87,878,500	100.00	87,878,500	100.00	100.00	100.00	0.80	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,484,100	0.84	92,484,100	0.84	92,484,100	100.00	92,484,100	100.00	100.00	100.00	0.84	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,850,000	0.18	19,850,000	0.18	19,850,000	100.00	19,850,000	100.00	100.00	100.00	0.18	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405,242,000	3.70	405,242,000	3.70	369,587,883	91.20	369,587,883	91.20	100.00	91.20	3.37	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,010,000											
12	Pengadaan Mebel	42,010,000	0.38	42,010,000	0.38	42,010,000	100.00	42,010,000	100.00	100.00	100.00	0.38	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,008,594,400											
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	150,816,000	1.38	150,816,000	1.38	141,912,355	94.10	141,912,355	94.10	100.00	94.10	1.30	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857,778,400	7.83	857,778,400	7.83	852,592,835	99.40	852,592,835	99.40	100.00	99.40	7.78	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371,062,606											
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	278,848,606	2.54	278,848,606	2.54	270,924,856	97.16	270,924,856	97.16	100.00	97.16	2.47	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,214,000	0.84	92,214,000	0.84	92,214,000	100.00	92,214,000	100.00	100.00	100.00	0.84	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	237,333,850											
17	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian dan Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	77,188,000	0.70	77,188,000	0.70	74,243,800	96.19	74,243,800	96.19	100.00	96.19	0.68	
18	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundangan - Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	160,145,850	1.46	160,145,850	1.46	160,145,850	100.00	160,145,850	100.00	100.00	100.00	1.46	
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	36,751,050											
19	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	36,751,050	0.34	36,751,050	0.34	36,751,050	100.00	36,751,050	100.00	100	100	0.34	

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENANG, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
	Pemberdayaan UMK yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,639,515,627											
20	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	190,707,877	1.74	190,707,877	1.74	190,574,800	99.93	190,574,800	99.93	100.00	99.93	1.74	
21	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	596,791,150	5.45	596,791,150	5.45	587,801,150	98.49	587,801,150	98.49	100.00	98.49	5.36	
22	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	421,382,550	3.85	421,382,550	3.85	420,798,550	99.86	420,798,550	99.86	100.00	99.86	3.84	
23	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan (DAK Non Fisik)	430,634,050	3.93	430,634,050	3.93	416,913,150	96.81	416,913,150	96.81	100.00	96.81	3.80	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	396,967,650											
24	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	396,967,650	3.62	396,967,650	3.62	342,151,650	86.19	342,151,650	86.19	100.00	86.19	3.12	
VI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	59,720,000											
25	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59,720,000	0.54	59,720,000	0.54	59,719,775	100.00	59,719,775	100.00	100.00	100.00	0.54	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26,267,000											
26	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26,267,000	0.24	26,267,000	0.24	21,697,000	82.60	21,697,000	82.60	100.00	82.60	0.20	
	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	113,190,300											
27	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	113,190,300	1.03	113,190,300	1.03	112,620,300	99.50	112,620,300	99.50	100.00	99.50	1.03	

VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	585,645,439											
28	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	585,645,439	5.34	585,645,439	5.34	67,563,310	11.54	67,563,310	11.54	100.00	11.54	0.62	
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	54,922,400											
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32,587,400	0.30	32,587,400	0.30	32,586,500	100.00	32,586,500	100.00	100.00	100.00	0.30	
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	22,335,000	0.20	22,335,000	0.20	21,685,000	97.09	21,685,000	97.09	100.00	97.09	0.20	
VIII	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK												
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	143,196,300											
31	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	143,196,300	1.31	143,196,300	1.31	138,479,797	96.71	138,479,797	96.71	100.00	96.71	1.26	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	575,649,600											
32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	58,908,500	0.54	58,908,500	0.54	58,908,500	100.00	58,908,500	100.00	100.00	100.00	0.54	
33	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	516,741,100	4.72	516,741,100	4.72	116,741,100	22.59	116,741,100	22.59	100.00	22.59	1.07	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	50,783,000											
34	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50,783,000	0.46	50,783,000	0.46	50,783,000	100.00	50,783,000	100.00	100.00	100.00	0.46	

IX	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	358,021,700											
35	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	247,932,800	2.26	247,932,800	2.26	222,142,172	89.60	222,142,172	89.60	100.00	89.60	2.03	
36	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	110,088,900	1.00	110,088,900	1.00	106,038,100	96.32	106,038,100	96.32	100.00	96.32	0.97	
X	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	76,234,000											
37	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	76,234,000	0.70	76,234,000	0.70	75,284,000	98.75	75,284,000	98.75	100.00	98.75	0.69	
	JUMLAH	10,958,090,103	100	10,958,090,103	100.00	9,668,269,154	88.23	9,668,269,154	88.23	100.00	88.23	2.38	

[illegible]

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2023 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 10.958.090.103 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu seratus tiga rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Kampar dan DAK Non Fisik PK2UMK yang terdiri dari :

- | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | : | Rp. | 3,819,205,341,- |
| 2. Belanja Langsung | : | Rp. | 6.708.250.712,- |
| 3. Dak Non Fisik | : | Rp. | 430.634.050,- |

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 10 (sepuluh) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Berdasarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (< 90%) adalah :
 - a. Program Pengembangan UMKM.
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (90 - 100%)
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
 - d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

NIHIL

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain :
 - a. Secara internal, penghambat capaian kinerja program/kegiatan adalah : (a) terbatasnya SDM di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK baik kuantitas maupun kualitas sehingga Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari bidang terkait kurang optimal; (b) terbatasnya sarana prasarana yang tersedia; (c) proses penentuan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi kurang efektif seperti kegiatan belum sesuai *time schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan; serta (d) belum optimalnya pengolahan data menyangkut perdagangan, koperasi dan UMK untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
 - b. Secara eksternal, kendala berhubungan dengan (a) kurangnya kesadaran untuk tertib serta patuh terhadap peraturan yang ada bagi Pengurus / Pengelola Koperasi seperti RAT tepat waktu, dan bagi pelaku usaha untuk legalitas atau izin berusaha; (b) kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan UMK; (c) kurangnya kemampuan pelaku UMK dalam memenuhi standar/kriteria produk sesuai pasar; dan (d) kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang.
5. Implikasi atau dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD antara lain realisasi Renja tahun 2023 mempengaruhi terhadap pencapaian target program Renstra OPD, artinya sampai akhir Desember 2023 terealisasi sebesar 88,23% dari target 100% yang direncanakan.
6. Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Pemanfaatan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan (usaha mikro kecil).
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang tersedia sebaik mungkin.
 - c. Konsistensi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sesuai prioritas kegiatan perdagangan, Koperasi dan UMK sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.

- d. Optimalisasi pengelolaan / pemutakhiran data dan informasi tentang perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro agar pengambilan keputusan / kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan minat, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya serta memberikan informasi yang dapat diterima akan manfaat kegiatan – kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bagi masyarakat.

Lebih jelasnya tingkat pencapaian hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tahun 2023 dan pencapaian Renstra tahun 2023 - 2026 ini dapat dilihat tabel T-C. 29 sebagai berikut :

TABEL 2.2 (TABEL T-C. 29)
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
TRIWULAN IV TAHUN 2023

[illegible]

[illegible]

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2023 – 2026 dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026, sebagaimana dituangkan dalam tabel T-C. 30 berikut :

Tabel 3 (TABEL T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Kabupaten Kampar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kantor baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek	100%	Terlaksananya Pembangunan kantor yang nyaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	100%	Terlaksananya RAT tepat waktu pada setiap Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	100%	Terbentuknya UMK yang Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	100%	Terbentuknya alat timbangan tanpa kecurangan di dlm perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya	100%	Terlaksananya makanan yang tanpa bahan pengawet dan pasar murah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya yang tersedia secara optimal.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4) dan urusan pilihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil kinerja Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Terlaksananya penyampaian laporan tepat waktu, baik itu laporan rutin maupun laporan berkala.
- b. Terealisasinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang naik pangkat.
- c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
- d. Bertambahnya peralatan gedung kantor dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Aparatur.
- e. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2024

2. Koperasi

Perkembangan jumlah Koperasi di Kabupaten Kampar dari Tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 yang aktif dan tidak aktif serta yang melaksanakan RAT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi yang RAT
di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah (Unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Jumlah Manajer	Jumlah Anggota	RAT (Unit)
2020	523	272	251	49	100.544	70
2021	532	272	251	51	105.620	80
2022	564	312	252	49	102.962	102
2023	573	322	251	49	108.864	92

Adapun kondisi perkembangan modal usaha, aset, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5
Perkembangan Modal Usaha, Aset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Koperasi	Modal Usaha		Aset (Rp M)	Omset (Rp M)	SHU (Rp M)
		Sendiri (Rp M)	Luar (Rp M)			
2020	523	330.274	123.954	720.628	730.496	28.438
2021	525	360.600	140.200	850.320	810.100	30.256
2022	564	389.721	128.304	790.974	688.309	29.479
2023	573	402.881	115.287	840.660	680.426	31.141

3. Bidang UMK

Mengenai perkembangan jumlah UMK binaan dan volume usaha UKM binaan di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6
UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Volume Usaha UKM Binaan (Rp)	Keterangan
2020	4.062	4.062	195.782.280.945	
2021	4.080	4.080	196.782.280.200	
2022	4.329	4.329	199.770.280.200	
2023	4.529	4.529	202.170.280.280	

4. Bidang Perdagangan dan Pasar

Perkembangan jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Perdagangan	Jumlah Pasar	Keterangan
2020	16.654	106	-
2021	17.200	4	Pasar Kelurahan
2022	1.033	4	
2023	1.054	4	

5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Distribusi Barang

Perkembangan jumlah Pengendalian Distribusi Barang, di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Distribusi Operasi Pasar Murah	Jumlah Kepokmas	Keterangan
2020	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak boleh berkerumunan dan pencegahan penularan Covid -19	
2021	6	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	
2022	14	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	Operasi Pasar Murah
2023	16	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	✦ 8 Operasi Pasar Murah ✦ 8 Belanja Tidak Terduga (BTT) Pasar Bersubsidi

Berikut jumlah perkembangan rekomendasi izin BBM/LPG Bersubsidi selama tahun 2020 - 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 9
Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM/LPG Bersubsidi
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Rekomendasi LPG	Jumlah Rekomendasi Toko Modern	Keterangan
2020	-	16	
2021	-	9	
2022	4	23	
2023	1	6	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan dan penumbuh kembang UMK karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengelolaan pasar-pasar tradisional.
2. Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati los-los dan kios-kios pasar yang telah disediakan pemerintah daerah.
3. Pasar Pemda yang membutuhkan rehabilitasi tetapi belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha.
5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang.
6. Belum optimalnya kemampuan managerial Pengurus/Pengelola Koperasi dan minimnya pengetahuan tentang perkoperasian.
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi.
8. Masih rendahnya mutu/kualitas UMK.
9. Belum optimalnya akses pemasaran UMK.

10. Kualitas produk yang belum sesuai standar sehingga sulit dipasarkan.
11. Lemahnya manajemen dan sistem pengelolaan keuangan UMKM.
12. Kurangnya akses permodalan.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan, koperasi dan pelaku usaha UMK.
14. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMK lokal.
15. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrollogian daerah.

b. Rekomendasi Catatan Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat. Tantangan paling nyata yang dihadapi ke depan terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK adalah dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

✧ KEKUATAN (S) :

- 1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 3) Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 4) Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknologi komunikasi dan informasi).
- 6) Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan kegiatan.

✧ KELEMAHAN (W) :

- 1) Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur.
- 3) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kepada aparatur.
- 4) Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 5) Rendahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang kantor.
- 7) Belum adanya database perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 8) Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya.

2. Lingkungan Eksternal

✧ PELUANG (O) :

- 1) Potensi perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
- 2) Tumbuhnya Koperasi baru dan meningkatnya Koperasi aktif.
- 3) Meningkatnya jumlah perdagangan.
- 4) Legalitas dan peluang usaha perdagangan maupun koperasi.
- 5) Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha.
- 6) Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif (wirausaha baru).

- 7) Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi
- 8) Keanekaragaman produk Usaha Mikro Kecil yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan.

✧ ANCAMAN (T) :

- 1) Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif.
- 2) Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus/Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global.
- 3) Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
- 4) Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah.
- 5) Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain.
- 6) Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya.
- 7) Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil.
- 8) Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan.

Tabel 10
Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (<i>S</i>)	KELEMAHAN (<i>W</i>)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2. Adanya peraturan perundangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan UMK 3. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 4. Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1)	1. Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK 2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur 3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur 4. Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK

	5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknologi komunikasi dan informasi) 6. Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam	5. Rendahnya mekanisme peneraan sanksi terhadap Koperasi dan UMK 6. Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor 7. Terbatasnya kewenangan
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
1. Potensi perdagangan, Koperasi dan UMK yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi 2. Pertumbuhan jumlah koperasi 3. Legalitas dan peluang usaha koperasi 4. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha 5. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 6. Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi 7. Keanekaragaman produk UMK yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan	1. Peningkatan dan penguatan pada usaha yang mengarah pada sektor industri kecil dalam pengembangan perekonomian daerah 2. Mengefektifkan pengelolaan pasar sebagai sumber peningkatan PAD guna kelangsungan pembangunan 3. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMK 4. Meningkatkan pengetahuan pelaku UMK dalam mengakses pasar.	1. Peningkatan dan pertumbuhan pengembangan KUMK yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Mengintensifkan penarikan terhadap retribusi pelayanan pasar, tunggakan dan mencari peluang potensi baru sehingga tercapainya target pendapatan dan retribusi pasar secara optimal; 3. Pengisian Galeri Produk Unggulan UMK; 4. Monitoring UMK yang telah melakukan kemitraan/kerjasama (MoU); 5. Pelatihan peningkatan kualitas produk UMK.
ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)
1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif. 2. Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus / Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global. 3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. 4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah. 5. Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan	1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan standarisasi dan pengendalian mutu barang; 3. Peningkatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen; 4. Meningkatkan standarisasi UMK dan Produk UMK; 5. Peningkatan pendidikan bagi pelaku usaha guna mengatasi bagi perkembangan lingkungan dunia usaha yang efektif;	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 2. Pengawasan terhadap barang beredar, produk SNI wajib, barang yang diatur dan pelaksanaan sertifikasi produk; 3. Menciptakan iklim investasi perdagangan dan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen; 4. Peningkatan standarisasi produk UMK dan perlindungan HAKI produk UMK; 5. Meningkatkan usaha guna terciptanya lingkungan usaha yang kondusif;

lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain.	6. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah melalui pengembangan system, sumber daya manusia aparat, dan kelembagaan koperasi.	6. Peningkatan kualitas dan penataan organisasi koperasi dan peningkatan profesionalisme pengurus.
6. Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya.		
7. Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil.		
8. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan		

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini dilakukan untuk mempertimbangkan urgensi Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, dan melakukan penyesuaian terhadap detail kegiatan yang dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan karena dianggap tidak cocok dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel T-C. 31 berikut :

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD TAHUN 2025 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0.00)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL				8,332,932,652.00					10,686,647,528.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,764,724,402.00	URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9,781,647,528.00	
	-				7,764,724,402.00	-				9,781,647,528.00	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	257 Koperasi	147,205,500.00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	257 Koperasi	150,000,000.00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Tertindakannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100 Koperasi	147,205,500.00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Tertindakannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100 Koperasi	150,000,000.00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	147,205,500.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	150,000,000.00	
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI		Peningkatan Kesehatan Koperasi	50 Koperasi	65,087,200.00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Peningkatan Kesehatan Koperasi	50 Koperasi	115,000,000.00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Tertindakannya Permenkop No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015	60 Koperasi	65,087,200.00			Tertindakannya Permenkop No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015	60 Koperasi	115,000,000.00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	35,087,300.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit	50,000,000.00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	29,999,900.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	65,000,000.00	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Pelatihan Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi	15 Orang	23,550,000.00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Pelatihan Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi	15 Orang	65,000,000.00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	23,550,000.00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	65,000,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	23,550,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	65,000,000.00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Terbinanya UMK	15 UMK	195,936,650.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Terbinanya UMK	15 UMK	235,000,000.00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	195,936,650.00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	235,000,000.00	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	24,362,300.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50,000,000.00	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	24,362,300.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	35,000,000.00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha	147,212,050.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha	150,000,000.00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	-		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	-	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal	15 UMK	24,256,250.00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal	15 UMK	50,000,000.00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	3 Event	24,256,250.00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	3 Event	50,000,000.00	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

Pengembangan Usaha Mikro											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	24,256,250.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit	50,000,000.00	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		-		7,308,688,802.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		-		9,166,647,528.00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	378,640,800.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	370,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,999,200.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	250,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	60,288,100.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	65,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	54,353,500.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,838,775,183.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,843,825,028.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	4,818,825,183.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	4,818,825,028.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	19,950,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	25,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	90,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	150,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	90,000,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150,000,000.00	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	707,911,675.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	975,000,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,120,600.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116,333,925.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,575,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51,056,150.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,264,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	454,562,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Paket	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Paket	1,500,000,000.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-		Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,500,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Semua Kota / Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-		Semua Kota / Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,025,988,644.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	982,822,500.00	

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169,860,000.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	56,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	856,128,644.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	926,822,500.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	267,372,500.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan	12 Bulan	345,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	87,372,500.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	180,000,000.00		Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	195,000,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				568,208,250.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				905,000,000.00	
-				568,208,250.00	-				905,000,000.00	
1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	100 Persen	102,374,700.00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	100 Persen	160,000,000.00	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Terlaksananya Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	164 Pelaku Usaha	44,279,500.00	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Terlaksananya Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	164 Pelaku Usaha	55,000,000.00	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	44,279,500.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	55,000,000.00	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	7,336,800.00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	50,000,000.00	

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	7,336,800.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	50,000,000.00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Terlaksananya Uji Sampel Bahan Berbahaya	5 Pasar	50,758,400.00	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	55,000,000.00
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	50,758,400.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	55,000,000.00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Peningkatan Sarana pasar	4 Pasar	42,420,300.00	PROGRAM PENINGKATAN		Peningkatan Sarana pasar	4 Pasar	100,000,000.00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	42,420,300.00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	100,000,000.00
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	20,071,600.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	50,000,000.00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pungutan Restribusi Pelayanan Pasar	2 Dokumen	22,348,700.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pungutan Restribusi Pelayanan Pasar	2 Dokumen	50,000,000.00
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Kecamatan	151,801,150.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Kecamatan	230,000,000.00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	54,525,500.00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	65,000,000.00
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	54,525,500.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	65,000,000.00

Rencana Kerja 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar

	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		<i>Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang</i>	19 Kecamatan	72,201,950.00	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		<i>Terlaksananya Pengendalian</i>	19 Kecamatan	115,000,000.00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	47,302,250.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	65,000,000.00	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota</i>	1 Laporan	24,899,700.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota</i>	1 Laporan	50,000,000.00	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	7 Distributor	25,073,700.00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	7 Distributor	50,000,000.00	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	1 Laporan	25,073,700.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	1 Laporan	50,000,000.00	
4	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		<i>Peningkatan Standarisasi Peralatan Kemetrolgian</i>	100 Persen	202,872,900.00	PROGRAM		<i>Peningkatan standarisasi</i>	100 Persen	350,000,000.00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		<i>Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian</i>	654 UTTP	202,872,900.00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		<i>Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian</i>	654 UTTP	350,000,000.00	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1300 Unit	152,447,050.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1300 Unit	200,000,000.00	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	40 Orang	50,425,850.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	40 Orang	150,000,000.00	

5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	2 Event	68,739,200.00	PROGRAM PENGGUNAAN		Peningkatan penggunaan	2 Event	65,000,000.00	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	3 Event	68,739,200.00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	3 Event	65,000,000.00	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota											
		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	68,739,200.00		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	65,000,000.00	
					8,332,932,652.00						10,686,647,528.00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara prioritas tidak ada yang ditujukan secara langsung ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tetapi kepada perangkat daerah terkait, terutama yang membidangi kegiatan bersifat pembangunan fisik. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan, seperti dituangkan pada tabel T-C. 32 berikut :

Tabel 12 (TABEL T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar

Nama PD : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1.	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Desa Bukit Kratai, Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan produksi UMKM	1 Kelompok	Disetujui, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll) dan Pagu/Volume Menyesuaikan
2.	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Dusun I, II, III dan IV, XIII Koto Kampar Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan produksi UMKM	1 Kelompok	Disetujui, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll) dan Pagu/Volume Menyesuaikan
3.	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Desa Kuok, Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan produksi UMKM	1 Kelompok	Disetujui, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll) dan Pagu/Volume Menyesuaikan
4.	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Desa Kumantan, Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan produksi UMKM	1 Kelompok	Disetujui, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll) dan Pagu/Volume Menyesuaikan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Kampar. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, visi Presiden tahun 2020 – 2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) arah utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi yang diuraikan berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 13
Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD

Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang pada Dinas
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengendalian Ketersediaan dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi
	Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Produk dan	Bidang UMK

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menunjukkan adanya hubungan untuk urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga ke depan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar berupaya untuk lebih meningkatkan produktivitas koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB melalui program dan kegiatan secara lebih terarah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra periode 2023-2026. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah “*Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025*”. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan 5 (lima) misi. Dari kelima misi tersebut, terdapat satu misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Periode 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14

Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025
MISI IV	:	Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perdagangan	- Terbinanya Pasar Rakyat	Revitalisasi Pasar	Pendataan dan Pembinaan Pedagang
	- Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen
Peningkatan Kualitas KUMK	- Meningkatnya Koperasi Aktif	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi
	- Meningkatkan Kualitas UMK	Menumbuhkan Minat Pelaku Usaha untuk Berwira Usaha melalui Pelatihan dan Pembinaan	Memberikan Pengetahuan, Pelatihan, Pengolahan Teknis Usaha Bagi Pelaku Usaha

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2. Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran

Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 :

1. Terbinanya Pasar Rakyat.
2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.
3. Meningkatkan Koperasi Aktif.
4. Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif tahun 2025 dalam Renstra, namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa diakomodir karena keterbatasan dana/pagu indikatif yang sudah ditetapkan.

- ✧ Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun 2025 mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin setiap tahun.
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
3. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
5. Prioritas pengembangan sistem perdagangan, perkoperasian dan Usaha Mikro yang diwujudkan dalam kegiatan.

Selain hal tersebut di atas, ada faktor lain yang menjadi rumusan program kegiatan juga meliputi :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
2. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro.
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program / kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

- ✧ Pada rancangan awal RKPD, plafon anggaran Tahun 2025 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar masih relatif kecil dan hanya ditujukan untuk program dan kegiatan yang bersifat rutin. Walaupun masing-masing perangkat daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi keuangan daerah mencukupi, mengingat asumsi pendapatan daerah untuk Tahun 2025 diperkirakan mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar di Tahun 2025 adalah 11 (sebelas) Program, 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 8.332.932.640,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

- ✧ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Tahun 2025, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar terdapat 11 Program, 22 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Terdapat 3 kegiatan penambahan pada tahun 2025 yaitu :

1. Pembangunan gedung kantor dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan fungsi pelayanan bidang perdagangan, koperasi dan UMK karena kondisi gedung kantor yang sudah tua, yang berdiri sejak kantor masih departemen.
2. Pengadaan mobil dinas untuk operasional kegiatan dalam rangka mendukung optimalisasi pembinaan di lapangan, karena Koperasi maupun UMK yang tersebar di 21 kecamatan dan masih ada di daerah sulit dan sangat sulit.
3. Operasi pasar, berdasarkan usul Sekretaris Daerah Kampar agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 4 kali untuk satu kecamatan, jadi operasi pasar tidak terbatas selama bulan suci ramadhan dan menjelang natal dan tahun baru (nataru) saja.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✦ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✦ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- ✦ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✦ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✦ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✦ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✦ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✦ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✦ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✦ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✦ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ✦ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✦ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✦ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✦ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✦ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ✦ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✦ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - ✦ Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

- ✦ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- ✦ Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ✦ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - ✦ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - ✦ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - ✦ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - ✦ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

6. Program Pengembangan UMKM

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - ✦ Pengembangan Usaha Mikro

7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - ✦ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - ✦ Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan

Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- ✦ Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- ✦ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- ✦ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- ✦ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- ✦ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kab/Kota
- ✦ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab /Kota

- ✦ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- ✦ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- ✦ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- ✦ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Berikut disajikan pada tabel T-C. 33 rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :

TABEL 15 (TABEL T-C. 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KAMPAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL				9,057,493,906.00				13,515,944,606.00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,489,285,656.00				12,885,609,256.00
	-				8,489,285,656.00				12,885,609,256.00
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- undangan		257 Koperasi	147,205,500.00			257 Koperasi	200,000,000.00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		60 Koperasi 125 Koperasi	147,205,500.00			60 Koperasi 125 Koperasi	200,000,000.00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	50 Unit Usaha	147,205,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	200,000,000.00
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Kesehatan Koperasi		50 Koperasi	65,087,200.00			50 Koperasi	106,000,000.00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Permenkop 06/Per/Dep.6/IV/2016		60 Koperasi	65,087,200.00			60 Koperasi	106,000,000.00
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30 Unit Usaha	35,087,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit Usaha	56,000,000.00

	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan								
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit Usaha	29,999,900.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit Usaha	50,000,000.00
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pelatihan Bagi Pengurus Dan Anggota Koperasi		15 Orang	23,550,000.00			15 Orang	65,000,000.00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		120 Orang	23,550,000.00			120 Orang	65,000,000.00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	23,550,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	65,000,000.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terbinanya UMK		15 UMK	195,936,650.00			15 UMK	560,000,000.00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro		1 Gedung PLUT	195,936,650.00			1 Gedung PLUT	560,000,000.00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
		Meningkatnya SDM dan Kemitraan Pelaku UMK	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit Usaha	24,362,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Unit Usaha	85,000,000.00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
		Jumlah Wirausaha Baru	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	24,362,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	75,000,000.00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah UMK yang Menerima Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Pendamping UMK	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit Usaha	147,212,050.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Unit Usaha	250,000,000.00

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 Orang	150,000,000.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya UMK		15 UMK	24,256,250.00			15 UMK	350,000,000.00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil		3 Event	24,256,250.00			3 Event	350,000,000.00
	Pengembangan Usaha Mikro								
		Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit	24,256,250.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Unit	350,000,000.00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			8,033,250,056.00				11,604,609,256.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan		12 Bulan	378,640,800.00			12 Bulan	450,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	263,999,200.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	275,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	60,288,100.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	75,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	54,353,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	100,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	5,563,336,437.00			12 Bulan	5,563,336,437.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Orang/bulan	5,543,386,437.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33 Orang/bulan	5,543,386,437.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	19,950,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	19,950,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	90,000,000.00			12 Bulan	90,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	90,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	90,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	707,911,675.00			12 Bulan	707,911,675.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20,120,600.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	20,120,600.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	116,333,925.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	116,333,925.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50,575,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	50,575,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	51,056,150.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	51,056,150.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,264,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	15,264,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	454,562,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	454,562,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	1,025,988,644.00			12 Bulan	1,025,988,644.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	169,860,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	169,860,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	856,128,644.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	856,128,644.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	267,372,500.00			12 Bulan	267,372,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	87,372,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	87,372,500.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	180,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	180,000,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah					-				3,500,000,000.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	3,500,000,000.00

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				568,208,250.00			630,335,350.00
	-				568,208,250.00			630,335,350.00
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha		100 Persen	102,374,700.00		100 Persen	102,374,700.00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan		164 Pelaku Usaha	44,279,500.00		164 Pelaku Usaha	44,279,500.00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	44,279,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	44,279,500.00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan tanda Daftar Gudang		21 Kecamatan	7,336,800.00		21 Kecamatan	7,336,800.00
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7,336,800.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	7,336,800.00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya		5 Pasar	50,758,400.00		5 Pasar	50,758,400.00
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya							
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,758,400.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	50,758,400.00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Sarana pasar		4 Pasar	42,420,300.00		4 Pasar	42,420,300.00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan		35 PKL	42,420,300.00		35 PKL	42,420,300.00

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20,071,600.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	20,071,600.00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		<i>Terlaksananya Pungutan Restribusi Pelayanan Pasar</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22,348,700.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	22,348,700.00
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>		12 Kecamatan	151,801,150.00			12 Kecamatan	151,801,150.00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok</i>		21 Kecamatan	54,525,500.00			21 Kecamatan	54,525,500.00
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
		<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	54,525,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	54,525,500.00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang</i>		19 Kecamatan	72,201,950.00			19 Kecamatan	72,201,950.00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	47,302,250.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	47,302,250.00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Masyarakat Miskin yang Difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat</i>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24,899,700.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	24,899,700.00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>		7 Distributor	25,073,700.00			7 Distributor	25,073,700.00

	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25,073,700.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	25,073,700.00
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian		100 Persen	202,872,900.00		100 Persen	265,000,000.00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolagian		654 UTTP	202,872,900.00		654 UTTP	265,000,000.00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1300 Unit	152,447,050.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1300 Unit	200,000,000.00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	50,425,850.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 Orang	65,000,000.00
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri		2 Event	68,739,200.00		2 Event	68,739,200.00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terselenggarakannya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar		3 Event	68,739,200.00		3 Event	68,739,200.00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
		Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 UMKM	68,739,200.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60 UMKM	68,739,200.00
					9,057,493,906.00			13,515,944,606.00
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR								
DENDI ZULHAIRI, M.Si NIP. 19730304 199201 1 001								

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menunjang tercapainya visi pembangunan Kabupaten Kampar, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”*. Upaya untuk mendukung Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang keempat yaitu *“Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan berorientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional”*. Dalam visi tersebut yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah menggerakkan sektor Perdagangan, Koperasi dan UMK yang berbasis sumber daya lokal.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar, yang disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro.

5.2 Rekomendasi

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah. Adapun rekomendasi perumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan

program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.

2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program / kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Renja Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
2. Renja Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025.
3. Semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

4. Renja Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025.

5.4 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pembangunan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan, Koperasi dan usaha mikro mutlak diperlukan, supaya masing-masing unit kerja dapat berperan aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas secara bertanggung jawab.

Mengingat bahwa Renja menjadi panduan bagi segenap pembina serta masyarakat terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, tersusunnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini diharapkan dapat dibangun komitmen bersama antar seluruh jajaran internal organisasi baik di Sekretariat maupun bidang-bidang dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Bangkinang, April 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM KABUPATEN KAMPAR



ANDI ZULHAIRI, M.Si

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730304 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR**

ALAMAT : JALAN LINGKAR STA (8+000) TELP. 20036 FAX. (0762) 20538

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim
Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar selama tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KAMPAR



RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisa Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Progran Kegiatan Masyarakat	15
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	24
 BAB V PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Berkala Capaian Renstra Dinas Perkim
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tabel 2.4	Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2025
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kampar Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. PerMen PU No. 32 /PRT/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
24. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2022).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra PD secara berkesinambungan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar:

1. Untuk memberikan gambaran kemampuan PD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
2. Untuk dijadikan alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pemimpin instansi, memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas PD serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2024.
3. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program atau kegiatan.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program atau kegiatan.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar.

a. Evaluasi Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2023 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian Keuangan, capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah sebesar 98,62 %.
- Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan sebesar 99,02 %.
- Sedangkan capaian kinerja sebesar 99,02 %.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2023 yakni sebesar 99,02 %.

b. Evaluasi Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Capaian keuangan, sampai dengan bulan Februari tahun 2024 capaian keuangan sebesar 0%.
- Capaian fisik sebesar 0%
- Sedangkan kinerja sebesar 0%

Apabila dilihat dari kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan bulan Februari 2024 dilihat dari capaian kinerja sebesar 0% disebabkan karena masih dalam tahap penyusunan administrasi kegiatan.

2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2024.

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2024 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan capaian diatas apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat di era

otonomi daerah mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang sangat cepat, kompetitif dan telah mempunyai konsep yang matang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renstra berjalan kegiatan yang dilakukan mulai Tahun 2024 menghadapi permasalahan antara lain :

1. Masih banyaknya rumah MBR yang tidak layak huni
2. Masih banyaknya bangunan yang belum sesuai peraturan yang berlaku
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum terpenuhi;
4. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
5. Belum terlaksananya pengurangan daerah Kawasan Permukiman Kumuh.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan kawasan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,

dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan masyarakat tersebut, ditetapkan satu indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan publik. Beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kampar. Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan 9 (Sembilan) indikator kinerja kunci. Indikator tersebut adalah Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, Persentase pemukiman yang tertata, Persentase lingkungan pemukiman kumuh, Persentase Luasan permukiman dikawasan perkotaan, Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan, Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah

ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah Warga Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar

1. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada Tabel dibawah ini.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Selain melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga melaksanakan beberapa pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan masyarakat tersebut antara lain :

1. Penerbitan rekomendasi pembangunan perumahan.
2. Penerbitan rekomendasi PSU.
3. Verifikasi penyerahan PSU Perumahan dan permukiman.
4. Verifikasi dan monitoring usulan rumah layak huni bagi MBR.
5. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat bencana.

6. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat relokasi program pemerintah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (dibawah 10 Ha)			0,61%	0,59%	0,53%	0,47%			0,53%	0,47%	
2.	Rasio Rumah Layak Huni			0,68%	0,65%	0,68%	0,70%			0,68%	0,70%	
3.	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau			45,54%	46,87%	49,70%	52,33%			49,70%	52,33%	

4.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung PSU			40,31%	42,78%	48,13%	53,48%				48,13%	53,48%	
----	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Adapun Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. Penanganan Backlog Rumah Tidak Layak Huni
2. Penanganan Basca Bencana
3. Penanganan Kawasan Kumuh.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar antara lain

- a. Bidang Perizinan, sertifikasi dan Registrasi
 1. Banyaknya Pengembang yang belum menyerahkan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) ke Pemerintah Daerah.
 2. Pengembangan kawasan strategis belum optimal
 3. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan surat menyurat tentang perizinan
- b. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Banyaknya PSU yang belum tertangani dengan kondisi buruk yang berada diluar SK Kawasan Permukiman.
 2. Pembangunan Jalan Lingkungan yang belum terjangkau diseluruh pedesaan
 3. Terbatasnya ruang lingkup wilayah/ kawasan yang boleh dibangun oleh bidang PSU
 4. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat masih rendah
 5. Pendataan dan perencanaan yang belum akurat
- c. Bidang Perumahan
 1. Data Rumah Tidak Layak Huni belum Valid.
 2. Data Unit Rumah Kabupaten Kampar Belum Valid
- d. Bidang Pemukiman
 1. Belum tertanganinya Kawasan kumuh.
 2. Masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau

3. Munculnya Kawasan kumuh baru sehingga menambah jumlah Luasan Kumuh Kabupaten Kampar.

2.3.2 Dampak Permasalahan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Dearah Kabupaten Kampar No. 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kampar 2005-2025, dimana termuat visi dan Misi yang wajib diselaraskan dengan program program yang ada di setiap PD. Adapun Misi Kabupaten Kampar yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- ***"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025."***
- ***Misi V : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan***

Sasaran yang akan dicapai yaitu Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Setiap Perubahan kebijakan pemerintah daerah selalu memiliki tantangan, kebijakan otonomi daerah mengamanatkan setiap daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusannya. Tantangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal disetiap Perangkat daerah memberikan nilai tambah untuk menciptakan setiap peluang dalam melaksanakan pelayanan yang prima.

Tantangan yang ada di dinas Perkim Kabupaten Kampar antara lain :

- a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar masih sangat terbatas dan kurang memadai
- b. Luasnya Kabupaten Kampar yang tidak melingkupi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengakibatkan pelayanan tidak merata.
- c. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelayanan Perangkat Daerah
- d. Beban Kerja yang tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia

Peluang yang perlu dimanfaatkan sebagai kekuatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

- a. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan
- b. Fasilitas Informasi Teknologi yang memungkinkan pengolahan data yang akurat
- c. Sarana komunikasi memberikan peluang untuk promosi profil kedinasan
- d. Visi Misi yang jelas mengarahkan setiap pengambilan kebijakan pemimpin

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

- **Bidang Perumahan**

Perlunya data base perumahan yang jelas tentang perencanaan diseluruh kabupaten Kampar yang didukung teknologi tinggi.

- **Bidang Permukiman**

- a. Perlunya data base kawasan permukiman yang jelas tentang perencanaan diseluruh kabupaten Kampar yang didukung teknologi tinggi.
- b. Melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada Kawasan Kumuh.

- **Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas**

Perlunya ketegasan tentang Ruang Lingkup kawasan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan. Sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan sarana seperti Jalan dan Drainase kepada masyarakat pengguna agar umur layanan sarana dan prasarana memenuhi rencana.

- **Bidang Perizinan**

Ketegasan terhadap masyarakat terhadap pelanggar hukum bidang perizinan perlu ditingkatkan agar penataan perumahan terkendali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah Kabupaten Kampar, OPD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan usulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2. 4 sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal usulan dari para pemangku kepentingan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar menerima usulan dari Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang mana di usulkan melalui pengentrian di aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) kemudian di lakukan verifikasi di Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Namun dalam penganggaran, tetap disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat pada table 2.5 sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut :

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
3. Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
- c. Teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan;
- g. Industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- l. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- m. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- o. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- p. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;

- q. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- r. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat. mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan Perumahan
2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
 - a) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial
 - b) Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
 - c) Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

A. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025 tidak lepas dari Visi Kabupaten Kampar yaitu, **"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025."** Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.

Visi dan misi hanya dapat dioperasionalkan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa **TUJUAN** dan **SASARAN**. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi dari kabupaten Kampar.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2023 – 2026 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
(1)	(2)	(3)	(4)	2023	2024	2025	2026
1	Pengurangan Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Meningkatnya Lingkungan Sehat Kawasan Pemukiman	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh (dibawah 10 ha)	0,59 %	0,53 %	0,47 %	0,40 %

2	Peningkatan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	0,65%	0,68 %	0,70 %	0,72 %
			Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	46,87 %	49,70 %	52,33 %	55,00 %
3	Peningkatan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	42,78 %	48,13 %	53,48 %	58,82 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan di bidang pekerjaan umum.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, lintas PD, dan lintas kewilayahan. Oleh karena itu mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, APBD Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
■ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	■ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 81.671.250 Rp. 3.992.401.774, Rp. 73.138.900 Rp. 608.349.451 Rp. 965.998.000 Rp. 552.583.700

Tujuan 2 : Pengurangan Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
■ Meningkatnya Lingkungan Sehat Kawasan Pemukiman	■ Program Kawasan Permukiman	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 165.000.000 Rp. 275.000.000 Rp. 260.000.000

Tujuan 3 : Peningkatan Pengembangan Perumahan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
■ Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	■ Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 100.015.800
		2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. –
		3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. -
		4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. –
		5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp. –
		6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp. 456.282.620
	■ Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	7. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.050.000.000

Tujuan 4 :Peningkatan Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
■ Meningkatnya Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	■ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp.1.840.000.000

	■ Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Rp. 150.000.000
--	---	---	-----------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar terdiri dari rencana program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Program 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 46.025.563.237,00.

Adapun secara detail alokasi anggaran tersaji dalam Tabel. 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang Perumahan dan Permukiman. Renja Tahun 2025 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka menyiapkan infrastruktur khususnya di bidang prasarana sarana Utilitas.

Bangkinang Kota, Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN KAMPAR



RUSDI HANIP, ST., MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19710707 199603 1 003

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD dan PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2025
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2			3		
1	04					4	5	6 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	04										
1	04										
1	04	01									
1	04	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1	0.17
1	04	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67
1	04	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67
1	04	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67
1	04	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67
1	04	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	04	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan								
1	04	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100	50 Orang/Bulan	200	100.00
1	04	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4	80.00
1	04	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4	80.00
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	04	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100	1 Orang	10	66.67
1	04	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	3 Orang	6 Orang	1 Orang	100	1 Orang	11	73.33
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	04	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4	100.00
1	04	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4	100.00
1	04	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4	100.00
1	04	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4	100.00
1	04	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4	100.00
1	04	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4	100.00

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	04	01	2	07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	1 Unit				1 Unit	2	40.00
1	04	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100		2	0.40
1	04	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit							0.00
1	04	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan La	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yan g disediakan	5 Unit							0.00
1	04	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit							0.00
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Laporan							
1	04	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	85.71
1	04	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	85.71
1	04	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	85.71
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	13 Unit							
1	04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	12	92.31

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	04	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	13	100.00
1	04	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6	46.15
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah yang layak								
1	04	02	2	01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Layak pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1	04	02	2	01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5	100.00
1	04	02	2	01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen							0.00
1	04	02	2	01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5	100.00
1	04	02	2	01	04	Penadataan Tingkat Kerusakan Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen							0.00
1	04	02	2	01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0.00
1	04	02	2	03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang terbangun dan terehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota								
1	04	02	2	03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit	0 Unit	0 Unit	Unit	-	3 Unit	0	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	04	06				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	04	06	2	01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	04	06	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	48 Laporan	16 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100	8 Laporan	46	95.83

Bangkinang, Juni 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR**



RUSDI HANIP, ST., MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19710707 199603 1 003

TABEL 2. 4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29,419,100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29,419,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,098,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,098,500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,993,900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,993,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8,123,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8,123,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12,036,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12,036,750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	3,937,374,874	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	3,937,374,874	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,275,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,275,900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	40,751,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	40,751,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kampar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	37,450,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kampar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	37,450,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	35,688,900	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	35,688,900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,888,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,888,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	148,960,051	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	148,960,051	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,257,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,257,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,672,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,672,400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7,392,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7,392,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	357,179,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	357,179,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,728,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,728,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	41,490,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	41,490,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	877,780,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	877,780,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	166,520,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	166,520,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	184,658,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	184,658,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201,405,700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201,405,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	-	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	-	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100,015,800	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100,015,800	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Tertangani	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Tertangani	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	-	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang		
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	-	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	-	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	-	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	200,000,700	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	200,000,700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	256,281,920	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	256,281,920	
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kampar	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kampar	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		
	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen		
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	165,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	165,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Laporan	-	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	275,000,000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Telegalisasi	2 Dokumen	275,000,000	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
	Perbaikan Rumah Tidal Kayak Huni	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	2 Unit Rumah	-	Perbaikan Rumah Tidal Kayak Huni	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	2 Unit Rumah	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Laporan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Laporan	-	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	-	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	-	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	-	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	260,000,000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	260,000,000	
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	330 Unit	900,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Kampar	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	330 Unit	900,000,000	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	3 Unit	150,000,000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	3 Unit	150,000,000	
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	10 Rumah Tangga	-	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	10 Rumah Tangga	-	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10 Orang	-	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10 Orang	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	100,000,000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	100,000,000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	35 Lokasi	1,340,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	35 Lokasi	1,340,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	30 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	30 Laporan	50,000,000	
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	-	
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	-	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	-	
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	-	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	-	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	20 Laporan	350,000,000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	20 Laporan	350,000,000	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20 Laporan	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20 Laporan	150,000,000	
					10,570,441,495					10,570,441,495	

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan
Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Riau Kabupaten Kampar.

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum					
I	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Disetujui OPD
1	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	DESA SIPUNGGUK	Dinas Perkim	Disetujui OPD
2	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	Desa Limau Manis	Dinas Perkim	Disetujui OPD
3	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	Pulau Lawas	Dinas Perkim	Disetujui OPD
4	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Desa Koto Perambahan, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
5	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Jl. Pelajar RW. 017 , Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
6	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Jl. Flamboyan RW. 001, Kab. Kampa	Dinas Perkim	Disetujui OPD
7	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Deli Makmur	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fasos Fasum ke Pemda)					
8	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Pulau Birandang	Dinas Perkim	Disetujui OPD
9	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	DUSUN I, II,III DAN IV DANTO, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
10	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	Dusun I dan II Desa Kampung Pinang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
11	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	180 M	DUSUN II BANDUR PICA, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
12	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	RT 02 RW 05 Sei Jernih Kel. Pasir Sialang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
13	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Tanjung Beringin, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
14	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Lipat Kain	Dinas Perkim	Disetujui OPD
15	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman	130 M	RW.03 Lingkungan Bodi Kelurahan Pulau Kecamatan	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	yang didukung dengan PSU		Bangkinang, Kab. Kampar		
16	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	120 M	Sahilan Darussalam	Dinas Perkim	Disetujui OPD
17	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	200 M	Desa Tanjung Berulak, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
18	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Simalinyang	Dinas Perkim	Disetujui OPD
19	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Desa Sungkai, Ranah Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
20	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Jl. Anggrek RT. 001 RW. 005 Kelurahan Bangkinang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
21	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	Lingkungan I, II, dan III Kelurahan Batu Bersurat, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
22	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Desa kampar, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)					
23	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Dusun IV Batu Belah RT 001 RW 001, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
24	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Desa Dua Sepakat, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
25	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	Desa Batu Sasak, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
26	Jalan Lingkungan lebar 2 M - 4 M Tebal 15 cm dan 13 cm (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	150 M	Dusun Koto Semiri, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
27	Drainase Type S2, S3, S4 dan Non Type (Kelurahan, Desa yang memiliki SK Kawasan dan Perumahan yang sudah Serah Terima Fasos Fasum ke Pemda)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100 M	Rt 02/ Rw 11 Dusun V Muara Jalai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
B	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				Dinas Perkim	Disetujui OPD
II	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Perkim	Disetujui OPD
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Sungai Petai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Teratak, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
3	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	desa sipungguk, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Bukit Keratai	Dinas Perkim	Disetujui OPD
5	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Lipat Kain Selatan	Dinas Perkim	Disetujui OPD
6	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Sungai Simpang Dua	Dinas Perkim	Disetujui OPD
7	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Limau Manis, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
8	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Siberuang	Dinas Perkim	Disetujui OPD
9	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Deras Tajak	Dinas Perkim	Disetujui OPD
10	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Gunung Sari	Dinas Perkim	Disetujui OPD
11	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Muara Takus	Dinas Perkim	Disetujui OPD
12	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Laboy Jaya	Dinas Perkim	Disetujui OPD
13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	desa sawah baru, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar kiri Tengah, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Kelurahan Lipatkain, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
16	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Sialang Kubang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
17	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Koto Perambahan, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
18	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Dusun I muara Talawo,Dusun II Teluk Masjid dan Dusun III Terusan Desa Mentulik., Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
19	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Sungai Geringging, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
20	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Dusun Suka Makmur Utama , Dusun Jati mulya dusun Giri mulya dan dusun sumber makmur, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
21	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Buluh cina, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
22	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa deli makmur, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
23	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Aur Kuning, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Kayu Aro, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
25	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Kampar, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
26	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Dusun I Tarok, II Danto, III danto dan IV Danto, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
27	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	BULUH NIPIS, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
28	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
29	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pulau Birandang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
30	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Lipat Kain Utara	Dinas Perkim	Disetujui OPD
31	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa sawah, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
32	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Bangun Sari	Dinas Perkim	Disetujui OPD
33	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa IV Koto Setingkai , Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
34	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Tambusai	Dinas Perkim	Disetujui OPD
35	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Koto Tuo Barat	Dinas Perkim	Disetujui OPD
36	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu	Dinas Perkim	Disetujui OPD
37	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pulau Rambai	Dinas Perkim	Disetujui OPD
38	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Lubuk Agung	Dinas Perkim	Disetujui OPD
39	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Kampung Pinang, Kab. kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
40	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Bandur Picak	Dinas Perkim	Disetujui OPD
41	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Simpang Petai	Dinas Perkim	Disetujui OPD
42	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Simpang Kubu, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
43	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Kel. Pasir Sialang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
44	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Tanjung Beringin, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
45	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Subayang Jaya, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Terusan, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
47	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Batu Sanggan, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
48	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Teratak Buluh	Dinas Perkim	Disetujui OPD
49	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa gajah bertalu, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
50	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	DESA RIMBA MAKMUR, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
51	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pulau Payung, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
52	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Ganting Damai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
53	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Perhentian Raja	Dinas Perkim	Disetujui OPD
54	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Tanjung Berulak, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
55	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desan Batang Betindah	Dinas Perkim	Disetujui OPD
56	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	DESA ALAMPANJANG, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
57	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Tanjung Balam	Dinas Perkim	Disetujui OPD
58	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Lubuk Siam	Dinas Perkim	Disetujui OPD
59	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Karya Bakti	Dinas Perkim	Disetujui OPD
60	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Tanjung Rambutan, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
61	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pangkalan Serik, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
62	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Hangtuah, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
63	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Danau Sontul, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
64	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Bukit Kemuning, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
65	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Sungai Santi, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
66	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Tanjung Belit, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
67	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Dua Sepakat, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
68	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Ludai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

1	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Bukit Betung, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
70	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pulau Terap, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
71	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Gading Permai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
72	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Sukaramai, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
73	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Lubuk Bigau, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
74	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Dusun I, II, III, & IV Simalinyang	Dinas Perkim	Disetujui OPD
75	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Kelurahan Sungai Pagar, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
76	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Ranah, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
77	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	desa koto tuo, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
78	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Rantau Kasih, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
79	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara	Dinas Perkim	Disetujui OPD
80	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	desa kuok, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
81	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Danau Lancang Kec.tapung	Dinas Perkim	Disetujui OPD
82	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Kampung Panjang, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
83	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Lereng, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
84	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Pulau Jambu, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
85	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	DESA NAUMBAL, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD
86	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rasio Rumah Layak Huni	3 Unit	Desa Siabu, Kab. Kampar	Dinas Perkim	Disetujui OPD

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3		4	5	6	7	8	9		10		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								10,570,441,495				7,301,278,228
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,274,143,075	APBD				2,575,349,966		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	81,671,250	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	89,838,375		
					Sub Kegiatan												
1	04	01	2.01	02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	29,419,100	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	32,361,010	
1	04	01	2.01	03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20,098,500	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,108,350	
1	04	01	2.01	04	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11,993,900	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,193,290	
1	04	01	2.01	05	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8,123,000	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,935,300	
1	04	01	2.01	06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	12,036,750	APBD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,240,425	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang/Bulan	3,992,401,774	APBD		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Orang/Bulan	65,434,535
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.02	01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang/Bulan	3,937,374,874	APBD		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Orang/Bulan	4,904,945
1	04	01	2.02	05	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	14,275,900	APBD		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	15,703,490
1	04	01	2.02	07	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	40,751,000	APBD		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	44,826,100
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	73,138,900	APBD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	80,452,790
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.05	02	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	-	APBD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	-
1	04	01	2.05	04	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	-
1	04	01	2.05	09	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	37,450,000	APBD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	41,195,000
1	04	01	2.05	11	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	35,688,900	APBD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	39,257,790
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	608,349,451	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	669,184,396
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.06	01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantoR yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5,888,500	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	6,477,350
1	04	01	2.06	02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	148,960,051	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	163,856,056
1	04	01	2.06	04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	59,257,500	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	65,183,250
1	04	01	2.06	05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	29,672,400	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	32,639,640
1	04	01	2.06	06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Dokumen	7,392,000	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	8,131,200
1	04	01	2.06	09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255 Laporan	357,179,000	APBD		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	255 Laporan	392,896,900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	-	APBD		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	-
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.07	0001	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit						
1	04	01	2.07	02	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	-	APBD		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	-
1	04	01	2.07	05	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	-	APBD		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	-
1	04	01	2.07	10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	-	APBD		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	-
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		965,998,000	APBD		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,062,597,800
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.08	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	46,728,000	APBD		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	51,400,800
1	04	01	2.08	03	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	41,490,000	APBD		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	45,639,000
1	04	01	2.08	04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	877,780,000	APBD		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	965,558,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		552,583,700	APBD				607,842,070
					Sub Kegiatan											
1	04	01	2.09	01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	166,520,000	APBD		Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	183,172,000
1	04	01	2.09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	184,658,000	APBD		Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	5 Unit	203,123,800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	01	2.09	09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	201,405,700	APBD		Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	221,546,270
1	04	01	2.09	10	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	-	APBD		Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	-
1	04	01	2.09	11	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	-	APBD		Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	-
1	04	02				Program Pengembang Perumahan	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		556,298,420	APBD				611,928,262
1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	100,015,800	APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	110,017,380
						Sub Kegiatan										
1	04	02	2.01	01	1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-
1	04	02	2.01	02	2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,015,800	APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	110,017,380
1	04	02	2.01	03	3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Tertangani	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
1	04	02	2.01	04	4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
1	04	02	2.01	05	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
					6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	-
					7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Terdatanya dan Terverifikasi Calaon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program							APBD				
					1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	-	APBD		Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Terhadap Tanggap Bencana	20 Orang	-
					2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	-	APBD		Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	20 Orang	-
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota yang terbangun dan terehabilitasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	-	APBD		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	4 Unit	-
					Sub Kegiatan											
1	04	02	2.03	01	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit Rumah	-	APBD		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	4 Unit Rumah	-
					2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Rumah	-	APBD		Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	-
					3	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit Rumah	-	APBD		Tersedianya Rumah Bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	-
					4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Rumah	-	APBD		Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	-
1	04	02	2.03	04	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Rumah	-	APBD		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	-
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	456,282,620	APBD		Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	501,910,882
					Sub Kegiatan											
1	04	02	2.06	01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200,000,700	APBD		Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	220,000,770
1	04	02	2.06	03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	256,281,920	APBD		Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	281,910,112

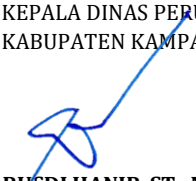
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
					3	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Informasi	-	APBD		Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	-
					4	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen	-
1	04	03			Program Kawasan Permukiman			500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700,000,000	APBD				770,000,000
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	165,000,000	APBD		Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di	53 Dokumen	181,500,000
					Sub Kegiatan											
1	04	03	2.01	01	1	Fasilitasi Pemunahan Komitmen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	165,000,000	APBD		Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	3 Dokumen	181,500,000
1	04	03	2.01	03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	-	APBD		Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	20 Laporan	-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	275,000,000	APBD			3 Dokumen	302,500,000
					Sub Kegiatan											
1	04	03	2.02	08	4	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	275,000,000	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	302,500,000
1	04	03	2.02	01	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	260,000,000	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	286,000,000
					Sub Kegiatan											
1	04	03	2.03	02	2	Perbaikan Rumah Tidal Kayak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Rumah	-	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	18 Unit Rumah	-
1	04	03	2.03	04	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	-	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	20 Laporan	-
1	04	03	2.03	06	5	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	4 Ha	-
1	04	03	2.03	07	6	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	-	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	-
1	04	03	2.03	08	7	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	500 Unit	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	260,000,000	APBD		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3 Unit	286,000,000
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,050,000,000	APBD				1,155,000,000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 Unit	1,050,000,000	APBD		Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun	230 Unit	1,155,000,000
					Sub Kegiatan											
1	04	04	2.01	01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 Unit	900,000,000	APBD		Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun	330 Unit	990,000,000
					2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	150,000,000	APBD		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun dalam rangka pencegahan kumuh	3 Unit	165,000,000
					3	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Dokumen Serah Terima Rumah baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-
					4	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Rumah Tangga	-	APBD		Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	10 Rumah Tangga	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
					5	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	-	APBD		Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10 Orang	-
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	42.78 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,840,000,000	APBD				2,024,000,000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	50 Lokasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Lokasi	1,840,000,000	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	50 Lokasi	2,024,000,000
					Sub Kegiatan											
1	04	05	2.01	01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	100,000,000	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	2 Dokumen	110,000,000
1	04	05	2.01	02	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Lokasi	1,340,000,000	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	35 Lokasi	1,474,000,000
1	04	05	2.01	03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	50 Lokasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	50,000,000	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	30 Laporan	55,000,000
					4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	-	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	1 Lokasi	-
					5	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	-	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	1 Lokasi	-
					6	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	1 Dokumen	-
1	04	05	2.01	04	7	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	350,000,000	APBD		Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	20 Laporan	385,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9		10
1	04	06			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	998				165,000,000
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	APBD		Terlaksananya ertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		165,000,000
					Sub Kegiatan											
1	04	06	2.01	01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	APBD		Terlaksananya ertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		165,000,000

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR


RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003

RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.17 Telp/Fax. (0762) 323710

BANGKINANG KOTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa dipersembahkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2025, selanjutnya teriring Shalawat dan salam Kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar didasarkan pada Rencana Kerja Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023-2026. Dalam Rencana Kerja (Renja) ini tersedia informasi mengenai rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2025.

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 merupakan salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang rencana pembangunan daerah. Sehingga kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Rencana Kerja berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Disamping itu juga memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran disertai dengan dana Indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Akhirnya kami mengharapkan saran serta kritikan demi penyempurnaan Renja ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, April 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR



YULI USMAN
Pembina Tk. I
Nip. 19730703 200312 1 003

DAFTAR ISI

Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	2
8	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	28
3.3 Program dan Kegiatan	30
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD dan Prakiraan Maju.....	3
5	
 BAB V. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1.1 : Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024	8
Tabel 2.2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13
Tabel 2.4.1 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	17
Tabel 3.3.1 : Indikator Kinerja dan Sasaran	25
Tabel 3.3.2 : Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang Dirinci Menurut Sumber..... Pendanaannya	30
Tabel 4.1.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap PD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang *“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”*. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2024. Renja PD ini merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari PD. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar tahun 2024 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintah. Untuk memaksimalkan pengelola perpustakaan dan Kearsipan agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan profesi dan perubahan, maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar tahun 2024.

Untuk merealisasikan program-program yang terkandung dalam Renstra PD perlu dilakukan rencana pelaksanaan kerja/kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan dari Renstra PD tersebut. Hal ini telah diatur oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Renja PD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja PD (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivisi dari renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar memiliki visi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kampar : **Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan masyarakat Agamis Tahun 2025** dan misi-misi ; (a) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global, (b) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat, (c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan, (d) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi apda agibisnis, agroindustry, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala local, regional, nasional maupun internasional, (e) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Tujuan akhir dari dua perundang-undangan yang telah disebutkan di atas adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan Kearsipan, menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan operasional pembangunan selama satu tahun dengan sasaran akhir mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategi untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar maka dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 No.25)

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara,
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan keseragaman pembangunan.
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4774);
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5071);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi, sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2882 tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Kabupaten Kampar;
21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2008 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
24. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026
26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Rencana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2024 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar yaitu **"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan masyarakat Agamis Tahun 2025"** dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustry, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala local, regional, nasional maupun internasional.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Dalam rangka mendukung misi Kabupaten Kampar poin 1 dan poin 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar memberikan dukungan dalam pelaksanaan misi yang dimaksud dalam upaya meningkatkan :

- Tingkat kegemaran membaca (TGM), peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM), pelestarian entitas budaya lokal (naskah kuno) serta penyelamatan arsip dinamis dan arsip statis

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan bidang perpustakaan dan Kearsipan kedepan secara teratur. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan serta untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 sampai 2026 dan merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar selama kurun waktu 4 (empat) tahun, artinya bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mempunyai nilai bobot tinggi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dimaksud.

Rencana Kerja (Renja) sangat bermanfaat dan diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu :

1. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja, organisasi pemerintah bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi tetapi dapat mengantisipasi perubahan secara proaktif.
2. Dengan Rencana Kerja, organisasi pemerintah dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil. Kapabilitas dan sumber daya yang difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Rencana Kerja dapat memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan dimasa mendatang. Karenanya, Rencana Kerja memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
4. Rencana Kerja bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu menjawab penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul serta dapat memanfaatkan peluang yang ada.
5. Rencana Kerja dapat menggambarkan pelayanan prima pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan aparat dituntut untuk memberikan pelayanan prima, yaitu memberikan kepuasan masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi pemerintah. Oleh karena itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Rencana Kerja dapat meningkatkan komunikasi, artinya implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasikan perbedaan kepentingan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi perencanaan strategis dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD dan Prakiraan Maju

BAB V. PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar yang sebelumnya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar sudah menjalankan Rencana Kerja APBD murni dan perubahan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Pada tahun 2023 terdapat 4 program, 14 kegiatan dan 31 subkegiatan. Secara umum seluruh program dan kegiatan mencapai target. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar tahun 2023. *Input* yang dimaksud disini dibatasi nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*. Sedangkan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar selama tahun anggaran 2023, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya dibawah 100%.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Akhir Renstra PD) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	4	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Laporan	1 Laporan	1	1	100%	1	2	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Orang	50 Orang	50	50	100%	50	100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2	4	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	8 Orang	8 Orang	8	8	100%	12	16	100%
4	Adimistrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	1	1	100%	1	2	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	2 Paket	2	2	100%	2	4	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	1	1	100%	1	2	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	1	1	100%	1	2	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1	2	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3	3	100%	3	6	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	1 Paket	1 Paket	1	1	100%	1	2	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	2 Unit	2 Unit	2	2	100%	1	4	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan	4 Laporan	4	4	100%	4	8	100%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	3 Laporan	3	3	100%	3	6	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6 Unit	6 Unit	6	6	100%	8	12	100%
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	40 Unit	40 Unit	40	40	100%	40	80	100%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah	1000 Ekselampar	1000 Ekselampar	1000	1000	100%	1000	2000	100%
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	20 Lokus	20 Lokus	20	20	100%	20	40	100%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	6 Orang	6 Orang	6	6	100%	6	12	100%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	21 Pustaka Kecamatan	21 staka Kecama	21	21	100%	21	42	100%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO									
10	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	30 Naskah	30 Naskah	30	30	100%	30	60	100%

	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
11	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase pengelolaan arsip dinamis	300 Berkas	300 Berkas	300	300	100%	300	600	100%
12	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase pengelolaan arsip statis	250 Arsip	250 Arsip	250	250	100%	250	500	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
13	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota									
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	400 Arsip	400 Arsip	400	400	100%	400	800	100%
14	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan									
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan	300 Arsip	300 Arsip	300	300	100%	300	600	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan baik kepada masyarakat atau instansi pemerintah lainnya. Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar. Berikut tabel 2.2.1 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kampar

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Urusan Perpustakaan											
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	-	Pengukuran Jumlah Pengunjung Pustaka Tahun	10,377 ORANG	28,335 ORANG	34,237 ORANG	34,237 ORANG	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Koleksi Buku yang ada di Perpustakaan Daerah		Pengukuran Koleksi Buku Pustaka	20,788 Exemplar	20,780 Exemplar	20,780 Exemplar	21.355 Exemplar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Rasio Perpustakaan per satu penduduk	-	Nilai Rasio Perpustakaan	0,0014 Orang	0,038 Orang	0,046 Orang	0,046 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	-	Pengukuran Jumlah Rata-rata pengunjung Tahun	0,046 %	14,16,5 %	11,412 %	11,412 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	Pengukuran Jumlah Koleksi Buku	84,169 Judul	84,169 Judul	84,169 Judul	84,354 Judul	12 Bulan	12 Bulan	0	0	
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.	-	Pengukuran Jumlah pustakawan dan tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

2	Kearsipan											
	Persentase perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku	-	Penerapan peningkatan perangkat daerah yang mengelolah arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	-	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 orang	3 orang	5 orang	5 orang	0	0	0	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dengan visi ” **Kabupaten Kampar sebagai negeri berbudaya, berdaya, dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025**” dengan misi-misi sebagai berikut:

6. Menyiapkan sumber daya yang handal dan profesional
7. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,
8. Membangun infrastruktur kabupaten kampar yang berkualitas dan profesional,
9. Menciptakan iklim usaha dan kondusif
10. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
11. Memperkuat citra kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang religius, beradab dan berbudaya

Dalam upaya mendukung visi Bupati Kampar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar memiliki beberapa isu penting dalam upaya mendukung visi tersebut antara lain :

1. Peningkatan mutu perpustakaan melalui akreditasi perpustakaan yang dinilai oleh asesor Perpustakaan Nasional.
2. Percepatan pendirian perpustakaan desa (1 desa 1 perpustakaan) yang mendukung pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
3. Mendata dan menelusuri sejarah-sejarah yang memiliki naskah kuno yang berada di masyarakat untuk dapat didaftarkan dan diselamatkan dalam bentuk ahli media.
4. Penertiban arsip vital pemerintah dalam bentuk digitalisasi.

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dapat kami cuplik kembali hal-hal yang terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yakni misi Bupati Kampar (2023-2026) nomor 1 dan 3 “mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global” dan “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan” untuk lebih rinci mengenai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kampar

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(15)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,089,488,008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,090,539,158	1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78,059,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79,110,450	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kampar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	54,722,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kampar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	54,722,800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,448,850	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,500,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,523,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,523,500	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,496,850	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,496,850	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,266,700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,266,700	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,600,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,600,600	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,229,283,232	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,229,283,232	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	4,227,693,782	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	4,227,693,782	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,589,450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,589,450	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9,383,600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9,383,600	
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,383,600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,383,600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	-	
	Adimistrasi Umum Perangkat Daerah				411,307,800	Adimistrasi Umum Perangkat Daerah				411,307,800	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,466,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,466,000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	213,949,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	213,949,700	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24,360,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24,360,000	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21,134,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21,134,100	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,996,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,996,000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	139,402,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	139,402,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,114,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,114,000	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
19	Pengadaan Mebel	Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20,114,000	Pengadaan Mebel	Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20,114,000	
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,153,609,576	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,153,609,576	

22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	242,808,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	242,808,000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	910,801,576	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	910,801,576	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187,730,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187,730,500	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	177,138,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	177,138,500	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	
26	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10,592,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10,592,000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				875,594,500	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				561,754,400	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				460,341,600	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				146,501,500	
27	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kampar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	80,292,600	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kampar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	80,292,600	
28	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20 Layanan	136,025,900						
29	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kampar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar	97,073,000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kampar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar	97,073,000	
30	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	97,521,600		Kampar				
31	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kampar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	10 Layanan	49,428,500	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektro	Kampar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	10 Layanan	49,428,500	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				415,252,900	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				415,252,900	
32	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kampar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	20 Lokus	105,557,300	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kampar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	20 Lokus	105,557,300	
33	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kampar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	79,819,800	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kampar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	79,819,800	

34	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kampar	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	133,743,800	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kampar	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	133,743,800	
35	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	96,132,000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	96,132,000	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				53,681,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				53,681,000	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				53,681,000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				53,681,000	
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kampar	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Naskah	53,681,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kampar	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Naskah	53,681,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				273,129,300	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				129,579,700	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				124,616,600	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				50,022,350	
37	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kampar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300 Berkas	50,022,350	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kampar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300 Berkas	50,022,350	
38	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	300 Berkas	74,594,250	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kampar	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	300 Berkas	74,594,250	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				79,557,350	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				79,557,350	
39	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kampar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2500 Arsip	79,557,350	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kampar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2500 Arsip	79,557,350	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				68,955,350	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				68,955,350	
40	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kampar	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	1 Pengguna	68,955,350	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kampar	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	1 Pengguna	68,955,350	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				190,737,450	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				190,737,450	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				60,245,500	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				60,245,500	
41	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kampar	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas	60,245,500	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kampar	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas	60,245,500	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				55,425,850	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				55,425,850	
42	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kampar	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	500 berkas	55,425,850	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kampar	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	500 berkas	55,425,850	

	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				75,066,100	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				75,066,100	
43	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusutan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah Kabupaten/Kota	400 berkas	75,066,100	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusutan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah Kabupaten/Kota	400 berkas	75,066,100	
					7,482,630,258					7,026,291,708	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Dalam upaya peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca yang menjadi usulan dari masyarakat antara lain :

1. Pembangunan perpustakaan di setiap desa
2. Peningkatan layanan perpustakaan daerah melalui kegiatan-kegiatan literasi
3. Peningkatan kualitas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus melalui akreditasi perpustakaan.
4. Mempercepat pendaftaran nomor pokok perpustakaan di setiap perpustakaan yang ada di Kabupaten Kampar
5. Pelestarian naskah kuno yang ada di Kabupaten Kampar
6. Penyelamatan arsip statis dan arsip dinamis

Setelah mengikuti musrenbang kecamatan pada tanggal Februari 2024, personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dikirim dan memantau langsung isi atau usul masyarakat dari musrenbang dapat disampaikan bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kampar

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Perpustakaan		NIHIL		
2.	Kearsipan				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output) serta berbasis pada tugas dan fungsi opd, maka penerapan peraturan kementerian dalam negeri (PERMENDAGRI) NO 90 TAHUN 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhiran kemendagri NO. 50-3708 TAHUN 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi

Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Kampar telah menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kebijakan-kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja :

- a) Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga, opd, desa/kelurahan, swasta dan masyarakat.
- b) Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan.
- c) Melaksanakan literasi sosialisasi/permasyarakat berbagai peraturan perundang undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan
- d) Peningkatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
- e) Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui pelestarian naskah kuno
- f) Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan panduan kearsipan
- g) Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Mempedomani isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar maka dapat kami uraikan kembali tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar berupa program-program dan kegiatan-kegiatan tahunan yang akan dibiayai khususnya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2025. Artinya bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mempunyai nilai bobot tinggi dalam kaitannya

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dimaksud.

Tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Kampar :

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan antar pemerintah (pemerintah pusat dan provinsi Riau), dunia usaha dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan mencakup antara pelaksana dengan pelaku pembangunan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi.
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah Kabupaten Kampar.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di daerah Kabupaten Kampar.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di daerah ini.

Dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran di dalam RPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya akses membaca bagi masyarakat.
2. Pemenuhan koleksi sesuai kebutuhan pemustaka.
3. Peningkatan layanan pada perpustakaan daerah dan kecamatan.
4. Peningkatan minat dan daya tarik masyarakat kepada perpustakaan.
5. Tertanya arsip dinamis dan statis di setiap SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, melaksanakan 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dimana di setiap program dan kegiatan mempunyai indikator sasaran sebagai dan kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan dalam renstra 2023-2026 untuk renja 2024 sebagai berikut :

	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31 Orang 2 Laporan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara - Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis bagi ASN	3 Paket 6 Orang
5.	Adimistrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Dokumen 1 Laporan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit 0 Unit

	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan 2 Laporan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit 0 Unit 20 Unit
II	Program Pembinaan Perpustakaan		
9.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	- Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan - Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi - Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	50 Perpustakaan 20 Layanan 6000 Exemplar 10 Eksemplar

	Daerah Tingkat Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	- Jumlah koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan - Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan
10.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya - Jumlah Layanan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota - Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan -	3 Orang 15 Perpustakaan 6 Orang 20 Lokus
III	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		
11.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	- Jumlah Naskah kuno	30 Naskah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
IV	Program Pengelolaan Arsip		
12.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	- Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2000 Berkas 31 Laporan

	- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
13.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	- Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna
V	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
14.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	- Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas
15.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip
16.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan Arsip bagi	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	400 Arsip

	Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--

Tabel.3.3.2

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang Dirinci Menurut Sumber Pendanaannya

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	Rp. 54.722.800
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD	Rp. 5.448.850
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	APBD	Rp. 5.523.500
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD	Rp. 5.496.850
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	APBD	Rp. 5.266.700
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD	Rp. 1.600.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	Rp. 4.227.693.782
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD	Rp. 1.589.450
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD	Rp. 9.383.600,
Adimistrasi Umum Perangkat Daerah		
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	Rp. 5.466.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	Rp. 213.949.700
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	Rp. 24.360.000
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	Rp. 21.134.100
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD	Rp. 6.996.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	Rp. 139.402.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
- Pengadaan Mebel	APBD	Rp. 20.114.000
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD	Rp. 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	Rp. 242.808.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	Rp. 910.801.576
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	APBD	Rp. 177.138.500

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	APBD	Rp. 0
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	Rp. 10.592.000
- Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		
Program Pembinaan Perpustakaan		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	APBD	Rp. 80.292.600
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 136.025.900
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	APBD	Rp. 97.073.000
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 97.521.600
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	APBD	Rp. 49.428.500
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 96.132.000
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	APBD	Rp. 133.743.800
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	APBD	Rp. 79.819.800
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	APBD	Rp. 105.557.300
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	APBD APBD	Rp. 53.681.000 Rp. 74.594.250
Program Pengelolaan Arsip		
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	APBD	Rp. 124.616.600
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	APBD	Rp. 79.557.350
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	APBD	Rp. 68.955.350
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	APBD	Rp. 60.245.500
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		

- Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	APBD	Rp. 55.425.850
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		
- Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta Penyerahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Rp. 75.066.100

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan 2025 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar. Sementara pagu alokasi dana untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sangat minim sekali dan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Agar terwujudnya Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah kiranya dapat mengalokasikan dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk program/kegiatan/subkegiatan akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Kampar diusulkan dana sebesar Rp. 7.482.630.258,-

Untuk terlaksananya Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar kiranya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi dana pada tahun anggaran 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten kampar tahun 2024 diperlukan rumusan program kegiatan. Rumusan program kegiatan rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten kampar tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan sebagai berikut :

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan kebijakan perencanaan bidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Keserasian dan keterpaduan bidang perpustakaan dan kearsipan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJP kabupaten Kampar.
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan elektabilitas pelaksanaan program kegiatan.

Secara garis besar rumusan program kegiatan rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program kegiatan pada rencana kerja (RENJA) dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Kampar tahun 2025 merupakan program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan berdaya saing.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 39 subkegiatan.
4. Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program kegiatan rencana kerja (Renja) dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Kampar tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD kabupaten Kampar.

Program kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagai mana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.1.1
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KAMPAR**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kampar	6 Dokumen	54,722,800	APBD		6 Dokumen	60,195,080
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	5,448,850	APBD		1 Dokumen	5,993,735
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	5,523,500	APBD		1 Dokumen	6,075,850
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	5,496,850	APBD		1 Dokumen	6,046,535

2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	5,266,700	APBD		1 Dokumen	5,793,370
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	1,600,600	APBD		1 Dokumen	6,000,000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	31 Orang	4,227,693,782	APBD		31 Orang	4,650,463,160
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	2 Laporan	1,589,450	APBD		2 Laporan	1,748,395
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	9,383,600	APBD		1 Laporan	10,321,960
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	31 Orang	4,227,693,782	APBD		31 Orang	4,650,463,160
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	2 Laporan	1,589,450	APBD		2 Laporan	1,748,395
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	9,383,600	APBD		1 Laporan	10,321,960
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kampar	3 Paket	-	APBD		3 Paket	-
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	6 Orang	-	APBD		6 Orang	-
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	5,466,000	APBD		1 Paket	6,012,600
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Paket	213,949,700	APBD		2 Paket	235,344,670

2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Paket	24,360,000	APBD		2 Paket	26,796,000
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Paket	21,134,100	APBD		2 Paket	23,247,510
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Dokumen	6,996,000	APBD		2 Dokumen	7,695,600
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	139,402,000	APBD		1 Laporan	153,342,200
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Unit	20,114,000	APBD		1 Unit	22,125,400
2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	4 Unit		APBD		4 Unit	-
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar	3 Laporan	242,808,000	APBD		3 Laporan	267,088,800
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Laporan	910,801,576	APBD		2 Laporan	1,001,881,734

2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kampar	6 Unit	177,138,500	APBD		6 Unit	194,852,350
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar	5 Unit		APBD		5 Unit	-
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar	20 Unit	10,592,000	APBD		20 Unit	11,651,200
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Kampar	50 Perpustakaan	80,292,600	APBD		50 Perpustakaan	88,321,860
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kab. Kampar	20 Layanan	136,025,900	APBD		20 Layanan	149,628,490
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Kampar	6000 Eksamplar	97,073,000	APBD		6000 Eksamplar	106,780,300

2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Kampar	10 Eksemplar	97,521,600	APBD		10 Eksemplar	107,273,760
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kab. Kampar	10 Layanan	49,428,500	APBD		10 Layanan	54,371,350
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Kampar	20 Lokus	105,557,300	APBD		20 Lokus	116,113,030
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Kampar	6 Orang	79,819,800	APBD		6 Orang	87,801,780
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Kampar	15 Perpustakaan	133,743,800	APBD		15 Perpustakaan	147,118,180
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kab. Kampar	3 Orang	96,132,000	APBD		3 Orang	105,745,200
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								

2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.03.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Kampar	5 Naskah	53,681,000	APBD		5 Naskah	59,049,100
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Kampar	2000 Berkas	50,022,350	APBD		2000 Berkas	55,024,585
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis	Kab. Kampar	31 Laporan	74,594,250	APBD		31 Laporan	82,053,675
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Kampar	25000 Arsip	79,557,350	APBD		25000 Arsip	87,513,085
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Kab. Kampar	1 Pengguna	68,955,350	APBD		1 Pengguna	75,850,885
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								

2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Kab. Kampar	1 Pengguna	60,245,500	APBD		1 Pengguna	66,270,050
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Kab. Kampar	500 berkas	55,425,850	APBD		500 berkas	60,968,435
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusutan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	400 berkas	75,066,100	APBD		400 berkas	82,572,710
	JUMLAH				7,482,630,258				8,235,132,624

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam upaya penyusunan rencana kerja tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah menyusun dan merumuskan perencanaan bidang Perpustakaan dan Kearsipan secara teratur sehingga diharapkan dengan adanya renja ini, adanya jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjabarkan visi misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kampar.

Hal-hal yang menjadi fokus dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar untuk mendukung misi Bupati Kampar sebagai berikut :

1. Pembinaan perpustakaan di tingkat Kabupaten
2. Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat
3. Peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat kabupaten Kampar
4. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
5. Penyelamatan arsip statis dan arsip dinamis

B. SARAN

Sejalan dengan lajunya derap pembangunan dewasa ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar sangat mengharapkan sumbangan pemikiran yang sifatnya membangun dan berwawasan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dari berbagai pihak demi penyempurnaan perencanaan dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar tahun 2025 ini disusun agar bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Renja PD ini, kami ucapkan terima kasih.

Banakinana. April 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR



YULI USMAN

Pembina Tk. I

Nip. 19730703 200312 1 003



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK
KABUPATEN KAMPAR
2025**

KATA PENGANTAR

Bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat dan KaruniaNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam dengan ucapan *Allahumma sholli 'ala Muhammad wasallim wabaarik 'alaihi* dihadiahkan kepada rahmatan lil 'alamin, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari penjabaran lima tahunan yaitu Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja (Renja) ini memiliki peranan penting karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat selama penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Bangkinang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMK KABUPATEN KAMPAR



DENDI ZULHAIRI, M.Si
Pimpinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730304 199201 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	45
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V. PENUTUP	59
5.1. Rekomendasi	59
5.2. Kaidah Pelaksanaan	60
5.3. Rencana Tindak Lanjut	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan April Tahun Anggaran 2025	10
Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	17
Tabel 3 (Tabel T-C. 29) Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten / Kota dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten Kampar Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 4 (T-C. 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	29
Tabel 5 (T-C. 31) Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025	33
Tabel 6 (T-C. 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kampar	40
Tabel 7 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD	44
Tabel 8 Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	45
Tabel 9 (T-C. 33) Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, yang mengemban tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor ... Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan di tiap perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 yang disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus pada pelayanan masyarakat di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK.

Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapannya.

Perlu dicermati bahwa sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, RENJA sebagai komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan khususnya dalam pengembangan atau pelayanan di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Kampar.

Beberapa prinsip dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun 2025, antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renja.
- b. Orientasi mengenai Renja.
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja.
- d. Pengumpulan Data dan Informasi.

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

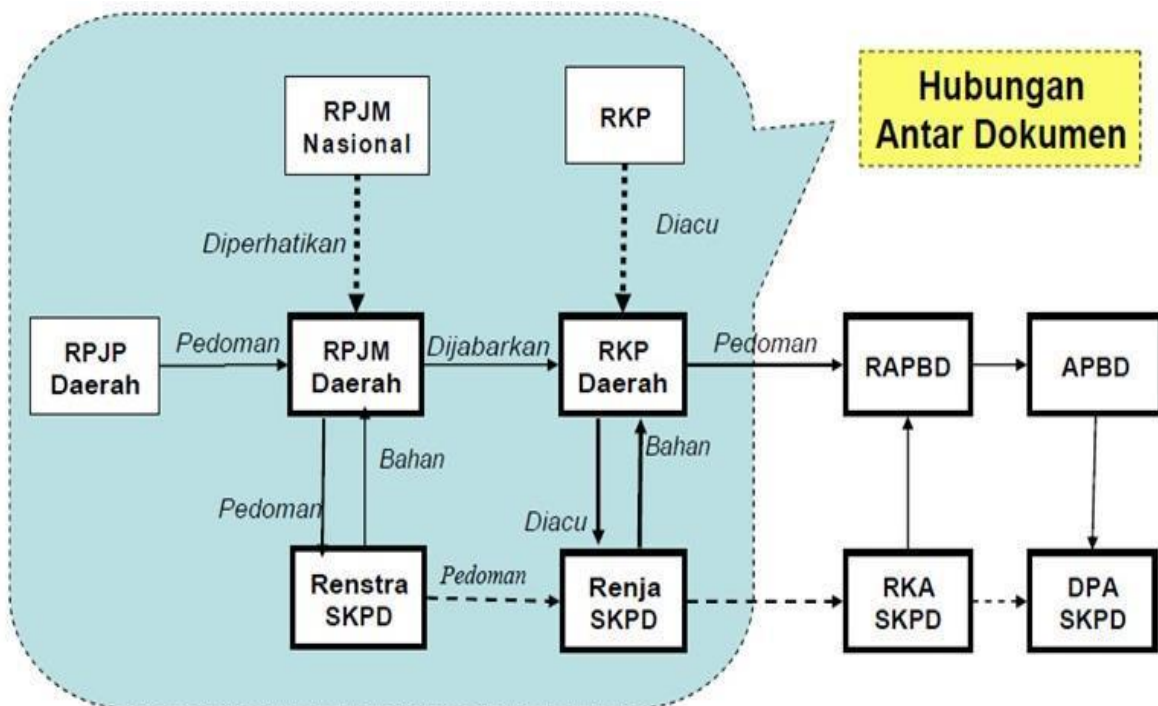
3. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- a. Pengolahan data dan informasi.
- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas.
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- h. Perumusan kegiatan prioritas.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
- j. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- k. Pembahasan forum Perangkat Daerah.

- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja.
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan Renja.

Mencermati prinsip dan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan sekaligus proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut.

Gambar 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berdasarkan pedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan pedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kampar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah sejalan dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengacu dan berpedoman pada peraturan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029;
28. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
3. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pencapaian visi dan misi;
4. RENJA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun lalu (2024) dan perkiraan tahun berjalan (2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk tahun perangkat daerah yang bersangkutan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 (sampai dengan April 2025) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam), yang pencapaian fisiknya di atas 50% atau yang mencapai target 100% sebanyak 4 sub kegiatan, yang capaian penyelesaian fisiknya di bawah 50% sebanyak 4 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 28 sub kegiatan
2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan 50% s/d 100% sebanyak 4 sub kegiatan, yang penyerapannya antara 30% s/d 50% sebanyak 4 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 28 sub kegiatan.

Lebih jelasnya hasil kegiatan tahun 2025 (sampai dengan bulan April) dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR POSISI : BULAN APRIL 2025											
PAGU ANGGARAN :		10.815.120.634									
JUMLAH PROGRAM :		10 Program									
JUMLAH KEGIATAN :		20 Kegiatan									
JUMLAH SUB KEGIATAN :		36 Sub Kegiatan									
REALISASI FISIK :		25,25									
REALISASI KEUANGAN :		2.731.356.408									
No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALA- HAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357.956.700									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	258.328.500	2,39	66.022.150	25,56	53.365.741	20,66	25,56	20,66	(4,90)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	84.113.500	0,78	34.785.300	41,36	6.784.200	8,07	41,36	8,07	(33,29)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.514.700	0,14	15.514.700	100,00	12.923.400	83,30	100,00	83,30	(16,70)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.567.574.504									
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.540.963.704	51,23	1.715.027.196	30,95	1.680.065.014	30,32	30,95	30,32	(0,63)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.610.800	0,25	10.146.000	38,13	17.160.800	64,49	38,13	64,49	26,36	
	Kepegawaian Perangkat Daerah	11.900.000									
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.900.000	0,11	11.900.000	100,00	-	-	100,00	0,00	(100,00)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.108.046									
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.517.900	0,14	6.064.000	39,08	6.723.100	43,32	39,08	43,32	4,25	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.483.746	1,80	156.347.356	80,39	18.101.653	9,31	80,39	9,31	(71,08)	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.718.000	0,39	12.023.000	28,15	14.142.800	33,11	28,15	33,11	4,96	

10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.682.400	0,38	11.088.800	27,26	7.557.600	18,58	27,26	18,58	(8,68)	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.264.000	0,14	5.088.000	33,33	3.816.000	25,00	33,33	25,00	(8,33)	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.442.000	3,89	115.960.000	27,58	48.737.734	11,59	27,58	11,59	(15,99)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.000.000									
13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000	2,22	240.000.000	100,00	224.720.499	93,63	100,00	93,63	(6,37)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.037.835.044									
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	181.706.400	1,68	60.568.800	33,33	47.755.213	26,28	33,33	26,28	(7,05)	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.128.644	7,92	285.376.212	33,33	238.343.388	27,84	33,33	27,84	(5,49)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.746.000									
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	186.116.000	1,72	71.889.000	38,63	54.369.186	29,21	38,63	29,21	(9,41)	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.630.000	0,14	14.570.000	93,22	10.735.000	68,68	93,22	68,68	(24,54)	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Kop yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	209.555.600									
18	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	209.555.600	1,94	85.685.600	40,89	54.969.700	26,23	40,89	26,23	(14,66)	
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	75.886.700									
19	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	35.087.500	0,32	29.267.500	83,41	8.107.200	23,11	83,41	23,11	(60,31)	

20	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	40.799.200	0,38	24.624.200	60,35	7.784.100	19,08	60,35	19,08	(41,28)	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENANG, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
	Pemberdayaan UMK yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	741.148.100									
21	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	354.349.550	3,28	209.832.350	59,22	23.151.600	6,53	59,22	6,53	(52,68)	
22	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	224.362.600	2,07	-	0,00	15.755.300	7,02	0,00	7,02	7,02	
23	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	162.435.950	1,50	57.371.950	35,32	50.219.800	30,92	35,32	30,92	(4,40)	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	897.044.390									
24	Pengembangan Usaha Mikro	897.044.390	8,29	32.375.450	3,61	40.330.450	4,50	3,61	4,50	0,89	
VI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	44.279.500									
25	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.279.500	0,41	15.009.500	33,90	-	-	33,90	0,00	(33,90)	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800									
26	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800	0,07	740.000	10,09	1.190.000	16,22	10,09	16,22	6,13	
	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	50.758.400									
27	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	50.758.400	0,47	16.960.400	33,41	-	-	33,41	0,00	(33,41)	

VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	41.370.300									
28	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.071.600	0,19	7.400.000	36,87	-	-	36,87	0,00	(36,87)	
29	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	21.298.700	0,20	11.228.700	52,72	1.450.000	6,81	52,72	6,81	(45,91)	
VIII	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK										
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	54.525.400									
30	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	54.525.400	0,50	21.138.000	38,77	5.760.000	10,56	38,77	10,56	(28,20)	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	97.201.950									
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	47.302.250	0,44	16.240.000	34,33	10.417.800	22,02	34,33	22,02	(12,31)	
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	49.899.700	0,46	30.699.600	61,52	-	-	61,52	0,00	(61,52)	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	25.073.700									
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.073.700	0,23	8.740.000	34,86	-	-	34,86	0,00	(34,86)	

IX	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	355.030.300									
34	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	242.698.250	2,24	93.129.700	38,37	45.144.330	18,60	38,37	18,60	(19,77)	
35	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	112.332.050	1,04	40.643.120	36,18	21.774.800	19,38	36,18	19,38	(16,80)	
X	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	69.789.200									
36	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	69.789.200	0,65	17.709.400	25,38	-	-	25,38	0,00	(25,38)	
	JUMLAH	10.815.120.634	100	3.551.165.984	32,84	2.731.356.408	25,25	32,84	25,25	(7,58)	

Bangkinang, 30 April 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL KAB. KAMPAR**



DENDI ZULHAIRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730304 199201 1 001

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2025 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 11.758.556.581,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.890.244.893,-
2. Belanja Langsung : Rp. 5.443.179.738,-
3. Dak Non Fisik : Rp. 425.131.950,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Adapun evaluasi hasil kegiatan tahun 2024 sebagaimana dituangkan pada tabel 2 berikut.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
BULAN DESEMBER 2024

PAGU ANGGARAN : 11.758.556.581
 JUMLAH PROGRAM : 10 Program
 JUMLAH KEGIATAN : 19 Kegiatan
 JUMLAH SUB KEGIATAN : 37 Sub Kegiatan
 REALISASI FISIK : 95,21
 REALISASI KEUANGAN : 11.195.139.751

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	331.133.500									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.177.850	2,37	278.177.850	100,00	262.828.750	94,48	100,00	94,48	(5,52)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.651.150	0,32	37.651.150	100,00	32.843.225	87,23	100,00	87,23	(12,77)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.304.500	0,13	15.304.500	100,00	15.002.025	98,02	100,00	98,02	(1,98)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.745.338									
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.443.179.738	46,29	5.443.179.738	100,00	5.242.606.544	96,32	100,00	96,32	(3,68)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.565.600	0,43	50.565.600	100,00	50.565.200	100,00	100,00	100,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.296.184									
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.634.200	0,08	9.634.200	100,00	9.580.800	99,45	100,00	99,45	(0,55)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.279.384	1,98	233.279.384	100,00	225.841.175	96,81	100,00	96,81	(3,19)	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.510.000	0,57	66.510.000	100,00	66.510.000	100,00	100,00	100,00	-	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.309.600	0,99	116.309.600	100,00	73.406.200	63,11	100,00	63,11	(36,89)	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.848.000	0,12	13.848.000	100,00	13.848.000	100,00	100,00	100,00	-	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.715.000	4,04	474.715.000	100,00	387.553.421	81,64	100,00	81,64	(18,36)	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.560.128									
12	Pengadaan Mebel	89.560.128	0,76	89.560.128	100,00	88.022.200	98,28	100,00	98,28	(1,72)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	985.142.424									
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	162.457.080	1,38	162.457.080	100,00	156.557.161	96,37	100,00	96,37	(3,63)	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.685.344	7,00	822.685.344	100,00	797.857.432	96,98	100,00	96,98	(3,02)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.950.500									
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	251.950.000	2,14	251.950.000	100,00	240.027.027	95,27	100,00	95,27	(4,73)	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.500.000	0,87	102.500.000	100,00	96.860.580	94,50	100,00	94,50	(5,50)	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.500	0,34	40.500.500	100,00	36.851.500	90,99	100,00	90,99	(9,01)	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	160.311.500									
18	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	160.311.500	1,36	160.311.500	100,00	159.431.500	99,45	100,00	99,45	(0,55)	
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	72.578.300									
19	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	35.087.300	0,30	35.087.300	100,00	33.040.300	94,17	100,00	94,17	(5,83)	
20	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	37.491.000	0,32	37.491.000	100,00	36.691.000	97,87	100,00	97,87	(2,13)	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENANG, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
	Pemberdayaan UMK yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.697.739.075									
21	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	705.245.425	6,00	705.245.425	100,00	671.673.857	95,24	100,00	95,24	(4,76)	

22	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	289.862.300	2,47	289.862.300	100,00	268.511.900	92,63	100,00	92,63	(7,37)	
23	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	277.499.400	2,36	277.499.400	100,00	261.377.480	94,19	100,00	94,19	(5,81)	
24	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (DAK Non Fisik)	425.131.950	3,62	425.131.950	100,00	420.609.950	98,94	100,00	98,94	(1,06)	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	279.791.300									
25	Pengembangan Usaha Mikro	279.791.300	2,38	279.791.300	100,00	270.938.000	96,84	100,00	96,84	(3,16)	
VI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	83.731.300									
26	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83.731.300	0,71	83.731.300	100,00	83.192.947	99,36	100,00	99,36	(0,64)	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800									
27	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800	0,06	7.336.800	100,00	7.336.800	100,00	100,00	100,00	-	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	56.654.300									
28	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	56.654.300	0,48	56.654.300	100,00	56.094.450	99,01	100,00	99,01	(0,99)	
VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	349.963.282									
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.087.600	0,17	20.087.600	100,00	20.017.400	99,65	100,00	99,65	(0,35)	
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	329.875.682	2,81	329.875.682	100,00	328.755.682	99,66	100,00	99,66	(0,34)	
VIII	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK										
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100.320.500									
31	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.320.500	0,85	100.320.500	100,00	100.247.750	99,93	100,00	99,93	(0,07)	

	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupten / Kota	434.788.400									
32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	87.577.500	0,74	87.577.500	100,00	85.998.825	98,20	100,00	98,20	(1,80)	
33	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	347.210.900	2,95	347.210.900	100,00	306.045.700	88,14	100,00	88,14	(11,86)	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	20.043.900									
34	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.043.900	0,17	20.043.900	100,00	19.603.100	97,80	100,00	97,80	(2,20)	
IX	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	217.550.650									
35	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	152.703.800	1,30	152.703.800	100,00	145.880.900	95,53	100,00	95,53	(4,47)	
36	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	64.846.850	0,55	64.846.850	100,00	64.661.770	99,71	100,00	99,71	(0,29)	
X	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	68.919.200									
37	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	68.919.200	0,59	68.919.200	100,00	58.269.200	84,55	100,00	84,55	(15,45)	
	JUMLAH	11.758.556.581	100	11.758.556.581	100,00	11.195.139.751	95,21	100,00	95,21	(4,79)	
Bangkinang, 31 Desember 2024 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KAB. KAMPAR  DENDI ZULHAIRI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19730304 199201 1 001											

Berdasarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan April 2025) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (< 90%) adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
 - e. Program Pengembangan UMKM.
 - f. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - g. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - h. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - i. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
 - j. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (90% - 100%)
 - a. Program / Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :
N I H I L
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain :
 1. Secara internal, penghambat capaian kinerja program/kegiatan adalah : (a) terbatasnya SDM di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK baik kuantitas maupun kualitas sehingga Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari bidang terkait kurang optimal; (b) terbatasnya sarana prasarana yang tersedia; (c) proses penentuan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi kurang efektif seperti kegiatan belum sesuai *time schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan; serta (d) belum optimalnya pengolahan data menyangkut perdagangan, koperasi dan UMK untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

2. Secara eksternal, kendala berhubungan dengan (a) kurangnya kesadaran untuk tertib serta patuh terhadap peraturan yang ada bagi Pengurus / Pengelola Koperasi seperti RAT tepat waktu, dan bagi pelaku usaha untuk legalitas atau izin berusaha; (b) kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan UMK; (c) kurangnya kemampuan pelaku UMK dalam memenuhi standar/kriteria produk sesuai pasar; dan (d) kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang.
5. Implikasi atau dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD antara lain realisasi Renja tahun 2025 mempengaruhi terhadap pencapaian target Program Renstra OPD, di mana pada posisi bulan April tahun 2025 baru terealisasi sebesar 25,25% dari target 32,84% yang direncanakan karena menunggu selesainya efisiensi anggaran.
6. Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Pemanfaatan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan (usaha mikro kecil).
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang tersedia sebaik mungkin.
 - c. Konsistensi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sesuai prioritas kegiatan perdagangan, Koperasi dan UMK sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.
 - d. Optimalisasi pengelolaan / pemutakhiran data dan informasi tentang perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro agar pengambilan keputusan / kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
 - e. Melakukan pembinaan dan pendampingan perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan minat, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya serta memberikan informasi yang dapat diterima akan manfaat kegiatan - kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bagi masyarakat.

Lebih jelasnya tingkat pencapaian hasil rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada triwulan I dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 3 (TABEL TC-29)
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2025)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2025)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja APBD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	I		II		III		IV		K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)	K (Majib Diisi)	Rp (Majib Diisi)									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		10.621.647.528		10.430.215.521		10.815.120.634	1.928.391.019		-		-		-		2.007.398.349								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		9.716.647.528		9.154.110.997		10.069.755.084	1.928.391.019		-		-		-		1.928.391.019								
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		9.166.647.528		7.611.878.460		8.146.120.294	1.770.112.869		-		-		-		1.770.112.869								
2	17	01	2,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	370.000.000		310.674.000	357.956.700		61.041.741	-	-	-	-	-	61.041.741								
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	250.000.000	12	Buku	262.828.750	12	Buku	258.328.500	3	41.334.141		41.334.141	-	16,00	12,00	304.162.891	120,00	121,67	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	65.000.000	12	Buku	32.843.225	12	Buku	84.113.500	3	6.784.200		6.784.200	100,00	8,07	24,00	39.627.425	240,00	60,97	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	55.000.000	10	Buku	15.002.025	10	Buku	15.514.700	6	12.923.400		12.923.400	60,00	83,30	16,00	27.925.425	160,00	50,77	DISPERDAGKOP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53,33	35,79						
Predikat kinerja																										
2	17	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	4.843.825.028		5.293.171.744	5.567.574.504		1.337.238.906	-	-	-	-	-	1.337.238.906								
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang / Bulan	4.818.825.028	12	Bln	5.242.606.544	12	Bln	5.540.963.704	3	1.320.078.106		1.320.078.106	25,00	23,82	15,00	6.562.684.650	45,45	136,19	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	25.000.000	10	Buku	50.565.200	10	Buku	26.610.800	7	17.160.800		17.160.800	70,00	64,49	17,00	67.726.000	170,00	270,90	DISPERDAGKOP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			47,50	44,16						
Predikat kinerja																										
2	17	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	150.000.000	-	-	11.900.000		-	-	-	-	-	-	-								
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-						
Predikat kinerja																										
2	17	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	975.000.000		776.739.596	729.108.046		64.137.353	-	-	-	-	-	64.137.353								
2	17	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000	12	Bln	9.500.800	12	Bln	15.517.900	3	6.723.100		6.723.100	25,00	43,32	15,00	16.303.900	1.500	10,87	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	220.000.000	12	Bln	225.841.175	12	Bln	194.483.746	3	18.101.653		18.101.653	25,00	9,31	15,00	243.942.828	1.500	110,88	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.000.000	12	Bln	66.510.000	12	Bln	42.718.000	3	13.002.800		13.002.800	25,00	30,44	15,00	79.512.800	1.500	144,57	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1	Paket	100.000.000	12	Bln	73.406.200	12	Bln	40.682.400	3	7.557.600		7.557.600	25,00	18,58	15,00	80.963.800	1.500	80,96	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	50.000.000	12	Bln	13.848.000	12	Bln	15.264.000	3	3.816.000		3.816.000	25,00	25,00	15,00	17.664.000	125,00	35,33	DISPERDAGKOP	
2	17	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	400.000.000	12	Bln	387.553.421	12	Bln	420.442.000	3	14.936.200		14.936.200	25,00	3,55	15,00	402.489.621	125,00	100,62	DISPERDAGKOP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	21,70						
Predikat kinerja																										

	2	17	01	2,87	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah			1.500.000.000		-		240.000.000		31.357.500	-		-		-		-		31.357.500										
	2	17	01	2,87	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.500.000.000		-	2	Paket	240.000.000	1	31.357.500					1,00	31.357.500											
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-								
																					Predikat kinerja													
	2	17	01	2,88		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			982.822.500		954.414.593		1.037.835.044		224.012.183	-		-		-		-	224.012.183										
	2	17	01	2,88	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	56.000.000	12	Bln	156.557.161	12	Bln	181.706.400	3	35.963.604				3	35.963.604	25,00	19,79	15,00	192.520.765	1.500	343,79	DISPERDAGKOP				
	2	17	01	2,88	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	926.822.500	12	Bln	797.857.432	12	Bln	856.128.644	3	188.048.579				3	188.048.579	25,00	21,96	15,00	985.906.011	125,00	106,37	DISPERDAGKOP				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				25,00	20,88								
																					Predikat kinerja													
	2	17	01	2,89		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			345.000.000		276.878.527		201.746.000		52.325.186	-		-		-		-	52.325.186										
	2	17	01	2,89	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	195.000.000	12	Unit	240.027.027	12	Unit	186.116.000	2	41.590.186				2	41.590.186	16,67	22,35	14,00	281.617.213	280,00	144,42	DISPERDAGKOP				
	2	17	01	2,89	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	12	Unit	36.851.500	12	Unit	15.630.000	9	10.735.000				9	10.735.000	75,00	68,68	21,00	47.586.500	2.100	31,72	DISPERDAGKOP				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				45,83	45,51								
																					Predikat kinerja													
																					Jumlah Per Program				24,86	20,65								
	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERIKSAAN KOPERASI				150.000.000		-		209.555.600		50.169.700	-		-		-		-	50.169.700											
	2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi serta Penilaian Koperasi		150.000.000		-		209.555.600		50.169.700	-		-		-		-	50.169.700											
	2	17	03	2,01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	Unit Usaha	150.000.000		-	3	Koperasi Berprestasi	209.555.600	1	50.169.700				1	50.169.700	33,33	23,94	1,00	50.169.700	2,00	33,45	DISPERDAGKOP					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				33,33	23,94								
																					Predikat kinerja													
																					Jumlah Per Program				33,33	23,94								
	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				115.000.000		69.731.300		75.886.700		15.891.300	-		-		-		-	15.891.300											
	2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dlm ± (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Permenkop No. 17/per/M.KUM/IX/2015		115.000.000		69.731.300		75.886.700		15.891.300	-		-		-		-	15.891.300											
	2	17	04	2,01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kemnangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	Unit Usaha	50.000.000	30	Koperasi	33.040.300	252	Koperasi	35.087.500	64	8.107.200				64	8.107.200	25,40	23,11	94,00	41.147.500	313,33	82,30	DISPERDAGKOP				
	2	17	04	2,01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3	Unit Usaha	65.000.000		36.691.000	252	Koperasi	40.799.200	53	7.784.100					53	7.784.100	21,83	19,08	53,00	44.475.100	1.767	68,42	DISPERDAGKOP				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				23,21	21,09								
																					Predikat kinerja													
																					Jumlah Per Program				23,21	21,09								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bangkinang, Maret 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KAMPAR



Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si

NIP. 19730304 199201 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029.

Tabel 4 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Kabupaten Kampar

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kantor baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek	100%	Terlaksananya Pembangunan kantor yang nyaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	100%	Terlaksananya RAT tepat waktu pada setiap Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	100%	Terbentuknya UMK yang Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	100%	Terbentuknya alat timbangan tanpa kecurangan di dalam perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya	100%	Terlaksananya makanan yang tanpa bahan pengawet dan pasar murah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara optimal.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4) dan urusan pilihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan dan penumbuh kembang UMK karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengelolaan pasar-pasar tradisional.
2. Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati los-los dan kios pasar yang telah disediakan pemerintah daerah.
3. Pasar Pemda yang membutuhkan rehabilitasi tetapi belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha.
5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang.
6. Belum optimalnya kemampuan managerial Pengurus/Pengelola Koperasi dan minimnya pengetahuan tentang perkoperasian.
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi.
8. Masih rendahnya mutu/kualitas UMK.
9. Belum optimalnya akses pemasaran UMK.
10. Kualitas produk yang belum sesuai standar sehingga sulit dipasarkan.
11. Lemahnya manajemen dan sistem pengelolaan keuangan UMKM.
12. Kurangnya akses permodalan.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan, koperasi dan pelaku usaha UMK.
14. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMK lokal.
15. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrollogian daerah.

b. Rekomendasi Catatan Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat. Tantangan paling nyata yang dihadapi ke depan terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK adalah dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global

tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini dilakukan untuk mempertimbangkan urgensi Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, dan melakukan penyesuaian terhadap detail kegiatan yang dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan karena dianggap tidak cocok dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 - 2029.

TABEL 5 (T-C. 31)
Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar
Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM		SESUDAH		PAGU INDIKATIF 2026
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			9,701,937,610.00		11,191,293,644.00	11,382,323,194.00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			9,701,937,610.00		11,191,293,644.00	11,382,323,194.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			9,701,937,610.00		11,191,293,644.00	11,382,323,194.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	-		7,599,443,970.00		8,818,902,804.00	9,009,932,354.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	316,804,850.00	12 Bulan	386,804,850.00	441,219,500.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	255,147,050.00	10 Dokumen	297,147,050.00	320,100,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10 Dokumen	48,708,900.00	10 Dokumen	65,708,900.00	65,708,900.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	12,948,900.00	10 Laporan	23,948,900.00	55,410,200.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,566,012,004.00	12 Bulan	5,571,012,004.00	6,151,433,904.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	5,540,963,704.00	33 Orang / Bulan	5,540,963,704.00	6,091,913,804.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	25,048,300.00	10 Laporan	30,048,300.00	59,520,100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	1 Paket	-	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	468,198,316.00	12 Bulan	799,656,650.00	815,749,450.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,132,300.00	1 Paket	18,132,300.00	18,132,300.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	192,307,016.00	1 Paket	210,500,100.00	36,054,200.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,160,000.00	1 Paket	55,600,250.00	55,600,250.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,598,000.00	1 Paket	43,598,000.00	43,598,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,264,000.00	12 Dokumen	17,264,000.00	17,264,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,737,000.00	12 Laporan	454,562,000.00	645,100,700.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Paket	240,000,000.00	5 Paket	1,000,000,000.00	540,100,200.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0.00	0.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	240,000,000.00	1 Unit	1,000,000,000.00	540,100,200.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	862,861,800.00	12 Bulan	862,861,800.00	862,861,800.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180,394,800.00	1 Laporan	180,394,800.00	180,394,800.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	682,467,000.00	1 Laporan	682,467,000.00	682,467,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	145,567,000.00	12 Bulan	198,567,500.00	198,567,500.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	130,297,000.00	5 Unit	178,297,000.00	178,297,000.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15,270,000.00	1 Unit	20,270,500.00	20,270,500.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- undangan	257 Koperasi	164,732,100.00	257 Koperasi	250,832,500.00	250,832,500.00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi serta Penilaian Koperasi	60 Koperasi 125 Koperasi	164,732,100.00	60 Koperasi 125 Koperasi	250,832,500.00	250,832,500.00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	164,732,100.00	50 Unit Usaha	250,832,500.00	250,832,500.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Kesehatan Koperasi	50 Koperasi	38,596,900.00	50 Koperasi	98,596,900.00	98,596,900.00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Permenkop No.17/per/M.KUKM/IX/20 15	60 Koperasi	38,596,900.00	60 Koperasi	98,596,900.00	98,596,900.00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	18,011,200.00	30 Unit Usaha	50,011,200.00	50,011,200.00
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	20,585,700.00	3 Unit Usaha	48,585,700.00	48,585,700.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Pelatihan Bagi Pengurs Dan Anggota Koperasi	15 Orang	-	15 Orang	61,405,200.00	61,405,200.00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	-	120 Orang	61,405,200.00	61,405,200.00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	-	20 Orang	61,405,200.00	61,405,200.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terbinanya UMK	15 UMK	1,026,275,350.00	15 UMK	988,666,950.00	988,666,950.00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung Plut	1,026,275,350.00	1 Gedung Plut	988,666,950.00	988,666,950.00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	778,585,000.00	60 Unit Usaha	778,585,000.00	778,585,000.00

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	167,081,950.00	50 Unit Usaha	210,081,950.00	210,081,950.00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha	80,608,400.00	60 Unit Usaha	150,000,000.00	150,000,000.00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	-	120 Orang	0.00	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK	15 UMK	872,889,290.00	15 UMK	972,889,290.00	972,889,290.00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	3 Event	872,889,290.00	3 Event	972,889,290.00	972,889,290.00
Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	872,889,290.00	200 Unit Usaha	972,889,290.00	972,889,290.00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			486,105,550.00		946,442,850.00	965,907,350.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			486,105,550.00		946,442,850.00	965,907,350.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	100 Persen	51,681,050.00	100 Persen	207,018,350.00	207,018,350.00
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	164 Pelaku Usaha	26,157,550.00	164 Pelaku Usaha	151,494,850.00	151,494,850.00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1 Dokumen	22,440,550.00	1 Dokumen	55,440,550.00	55,440,550.00
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	7,336,800.00	21 Kecamatan	50,336,800.00	50,336,800.00
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	3,717,000.00	1 Dokumen	45,717,500.00	45,717,500.00

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	25,523,500.00	5 Pasar	55,523,500.00	55,523,500.00
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	25,523,500.00	1 Laporan	55,523,500.00	55,523,500.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Sarana pasar	4 Pasar	20,871,900.00	4 Pasar	100,871,900.00	100,871,900.00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	20,871,900.00	35 PKL	100,871,900.00	100,871,900.00
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	10,208,300.00	2 Dokumen	50,208,300.00	50,208,300.00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	10,663,600.00	2 Dokumen	50,663,600.00	50,663,600.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Kecamatan	144,677,450.00	12 Kecamatan	267,677,450.00	267,677,450.00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	27,455,100.00	21 Kecamatan	65,455,100.00	65,455,100.00
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	27,455,100.00	1 Laporan	65,455,100.00	65,455,100.00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang	19 Kecamatan	104,631,450.00	19 Kecamatan	151,631,450.00	151,631,450.00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	23,824,050.00	1 Laporan	65,824,050.00	65,824,050.00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	80,807,400.00	1 Laporan	85,807,400.00	85,807,400.00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7 Distributor	12,590,900.00	7 Distributor	50,590,900.00	50,590,900.00
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	12,590,900.00	1 Laporan	50,590,900.00	50,590,900.00

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian	100 Persen	223.099.650,00	100 Persen	305.099.650,00	305.099.650,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolagian	654 UTTP	223.099.650,00	654 UTTP	305.099.650,00	305.099.650,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1300 Unit	153.324.250,00	1300 Unit	200.324.250,00	200.324.250,00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 Orang	69.775.400,00	40 Orang	104.775.400,00	104.775.400,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	2 Event	45.775.500,00	2 Event	65.775.500,00	85.240.000,00
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	3 Event	45.775.500,00	3 Event	65.775.500,00	85.240.000,00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	60 UMKM	45.775.500,00	60 UMKM	65.775.500,00	85.240.000,00
				10.188.043.160,00		12.137.736.494,00	12.348.230.544,00
Bangkinang, Juni 2025							
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR							
							
Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si							
NIP. 19730304 199201 1 001							

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara prioritas tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 6 (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar

TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
19-02-2024	AGUS CANDRA, S.Ip	Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Belum	Kab Kampar, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	sesuaikan dengan program kegiatan OPD, proses sesuai aturan	Sudah ditindak lanjuti, lengkapi data dan menunggu tahap selanjutnya	-	50	Orang	200,000,000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
22-02-2024	SUNARDI DS, A.Mk	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Pembuatan Gerobak Jualan untuk Peningkatan UMKM di Desa Kasikan	Desa Kasikan., Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	lanjutan sesuai aturan berlaku	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	40	Unit	500,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
22-02-2024	HABIBUR RAHMAN, S.Ag., M.Pd	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Untuk Modal Usaha UMKM	DESA KUNTU, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Ditolak	Mohon Maaf Usulan ini Kami Tolak dikarenakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tidak Memberikan Modal Usaha Terhadap Pelaku Usaha Melainkan Peralatan dan Perlengkapan Para Pelaku Usaha yang diusulkan terimakasih	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	diperjelas maksud usulan sesuai kewenangan dinas dan aturan berlaku	-	50	ORANG	-	Non Belanja Transfer	-	
22-02-2024	HABIBUR RAHMAN, S.Ag., M.Pd	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Tidak ada Mesin untuk Bajak Sawah	DESA MAYANG PONGKAI, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	-	Dikembalikan	usulan ke dinas pertanian tanaman pagan dan Hortikultura	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	-	-	-	10	UNIT	-	-	-
23-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Peningkatan SDM bagi Pelaku UMKM	Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	sesuaikan dengan maksud usulan, proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	50	Orang	200,000,000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
23-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Peningkatan SDM bagi Pelaku UMKM	Kecamatan Perhentian Raja , Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan maksud usulan dan program Dinas proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	50	Peserta	200,000,000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
24-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Pengadaan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	RW 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	usulan disesuaikan dengan program OPD proses sesuai aturan berlaku	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	25	UMKM	350,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
24-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu , Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas, proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulanDiteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan	-	25	UMKM	350,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM Pembuatan Kerupuk An.ASMIDA (1401066710790002)	Jalan Dagang RT.02 RW.01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu , Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	usulan di sesuaikan dengan program dan kegiatan dinas, proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM Membuat Opak Parut & Jualan bakso Bakar An. HERLINA YUSNITA (1401064507860012)	Jalan Dagang Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulup Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM Sarapan Pagi An. Marini (1401066803800001)	Jalan Dagang RT.02 RW.01 Dusun IV Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulup Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM Kertipik Mangglegng dan Kerupuk Opak	Jalan Dagang Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	25	UMK	350,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM Kedai Harian An. Sri Maryani (1401066302730001)	Jalan Dagang Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulup Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro

25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM Pembuatan Keripik dan Kerupuk Opak An. SUPINI (1401066509680002)	Jalan Dagang RT.02 RW.01 Dusun IV Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM Pembuatan Keripik dan Kerupuk Opak An. SUPINI (1401066509680002)	Jalan Dagang RT 02 RW 01 Desa Tanah Merah, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pembelian Oven Gas ukuran 130 x 860 x 650 mm dan Mixer Roti Kapasitas 3 Kg An. Trina Etika	An. Trina Etika Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Oven Gas Ukuran 130 x 860 x 650mm dan Klatat Ukuran 35 x 35 An. Istikomah	Istikomah Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Freezer Box dan Mesin Vacuum Makanan An. Ghea Tiara Aginta	Ghea Tiara Aginta Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	65,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan 1. Freezer box 2. Panci Odeng (panci 4 sekat) An. Jeni Tri Ningsih	An. Jeni Tri Ningsih Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	60,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Freezer Box untuk UMKM An. Luluk Kamila dan Vita Cahya Dewi	An. Luluk Kamila dan Vita Cahya Dewi Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	2	Paket	150,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Steling Jualan An. Sumarti	An. Sumarti Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Kompor Bakaran An. Nada Gigih Putri	An. Nada Gigih Putri Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Mesin Cuci Pintu Depan Kapasitas 15 Kg An. Sriyatin	An. Sriyatin Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	20,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan 1. Stand Tenda Jualan Ukuran 3 x 6 2. Kursi Sandar Napoleon 6 Psc An. Kastini	An. Kastini Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Warung Kopi An. Open Ricardo.P (1406012408880001)	Jl. Jalan Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Martabak Bangka An. Rafi Gusnanda (1401062806860003)	Jln. Toba RT 01 RW 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Marbak Bangka An. Rafi Gusnanda (1307021208980001)	Jln. Sumber Rezeki RT 02 RW 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Warung Kopi An. Gunung Parulian Harianto.S	Perum Nuasa Dagang RT 01 RW 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Pembuatan Jus An. Afri Deni (1471095006920041)	Jl. Toba, Perum Toba Lestari RT 01 RW 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pengembangan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Bengkel Sepeda Motor An. Joni Saputra Fahsa (1401060508850009)	Dusun II Suka Makmur RT 02 RW 02 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	100,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Bakso Ajib RT 02 RW 02 Desa Meidiandi (1401066405010004)	Jln. Datuk Penghulu Mudo Bakar dan JUS An. Dia Meidiandi Buluh Nipis, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Warung Kopi Rambah Mekar	Jln. Raya Pasir Putih RT 01 RW 01 Dusun 3 Pasir Putih Desa Baru Kec Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Jeruk Manis An. Rusnidar (1401064805660003)	An.Rusnidar Jl. Datuk Penghulu Mudo Ajib Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Jus An. Tria Andani (1205206402980002)	Jl. Datuk Penghulu Mudo Ajib, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	25,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Menjahit Pakalan AN. Desy Atriyatu (1401067112780010)	Jalan Datuk Penghulu Mudo Ajib Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	100,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Aksesoris Sepeda Motor An. Zaiful (1304122704860001)	Jalan Datuk Penghulu Mudo Ajib Jl.Datuk Penghulu Mudo Ajib, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	50,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM Warung Angkringan An. Siti Nurbaya (1401064308870002)	Jl. Datuk Penghulu Mudo Ajib Desa Buluh Nipis, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	150,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM An. Bunda Yora 1. Mesin Pengereng Makanan 2. Wajan / Kuali Jumbo 3. Kompor Gas Besar 4. Dandang Besar/Jumbo untuk Perebus Kerupuk	Jalan Kruwing Raya Dusun Dua Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	200,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Pengadaan Sarpras UMKM An. Kantin DJ 1. Magic Com Besar 2. Blender 3. Cofer Penggiling Daging 4. Kompor Gas 2 Tungku dan Tabung Gas 5. Kulkas Showcase 6. Kursi dan Meja 7. Piring dan Gelas Karah 8. Termos Nasi Besar 9. Wajan Besar 10. Dandang Pengukus Besar	Jalan Kempas RW.12 Dusun Dua Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	200,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25-02-2024	TONY HIDAYAT, SE	Bantuan Sarpras Pelaku Usaha UMKM	Bantuan Sarpras UMKM An. PECEL LELE LAMONGAN Mbak DEVI 1. Kompor Miyako 1 tungku 1 pcs 2. Kompor Rinali 2 tungku 1 pcs 3. Kursi 24 pcs 4. Stelling /Etalase Ayam 5. Showcase/Freezer 6. Dandang No. 24 2pcs 7. Kuali No. 32 8. Piring 5 Lusin 9. Gelas Royalex 5 Lusin 10. Sendok 3 Lusin 11. Ember Cucian 2 pcs 12. Bohlam 40 Watt 2 pcs 13. Mesin Pompa Air 14. Meja Lipat 2 pcs 15. Termos Nasi No. 30 2 pcs 16. Kotak Kontainer 2 pcs	PECEL LELE LAMONGAN Mbak DEVI Dusun 2 Pandau Permai, Kab. Kampar	Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	Verifikasi TAPD	-	Sudah Sesuai dengan Usulan DPRD	disesuaikan dengan program dinas kalau memungkinkan proses sesuai aturan	Diteruskan ke tahap selanjutnya, lengkapi data dan dokumen pendukung usulan	-	1	Paket	850,000,000	-	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Kampar. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, visi Presiden tahun 2020 - 2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) arah utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7
Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD

Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang pada Dinas
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengendalian Ketersediaan dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi
	Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Produk dan	Bidang UMK

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menunjukkan adanya hubungan untuk urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga ke depan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar berupaya untuk lebih meningkatkan produktivitas koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB melalui program dan kegiatan secara lebih terarah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra periode 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera Tahun 2030”**. Visi dapat dicapai melalui penerapan 7 (tujuh) misi, dan terdapat satu misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Periode 2025-2029 sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 8

Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

VISI	:	Mewujudkan Kabupaten Kampar Yang Maju, Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera Tahun 2030		
MISI V	:	Meningkatkan daya saing produk daerah. Dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan keunggulan produk unggulan daerah di pasar lokal, nasional dan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi, branding, pemasaran, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha local		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang	- Meningkatnya kapasitas dan kualitas perdagangan	Revitalisasi dan sosialisasi tentang pentingnya higienis pasar	Pendataan dan Pembinaan Pedagang	
		Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen	

mandiri, tangguh dan berdaya saing	- Meningkatnya Koperasi yang sehat, berlegalitas dan produktif	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi	Melakukan pembinaan dan penyuluhan Koperasi
	- Meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMK yang mandiri, tangguh dan berdaya saing	Mengembangkan UMK dan kewirausahaan Masyarakat	Mengembangkan ekosistem kewirausahaan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, akses modal usaha, dan pembinaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)
		Memperkuat produk unggulan daerah dan membuka akses pasar	Memperkuat promosi produk unggulan daerah melalui membangun kemitraan dengan perusahaan besar dan sektor swasta untuk menciptakan peluang kolaborasi, baik dalam hal pembelian produk maupun akses ke rantai pasok

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing produk.
2. Tumbuhnya ekonomi daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran dimaksud memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perdagangan.
2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.
3. Meningkatnya Koperasi yang sehat, berlegalitas dan produktif.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kampar, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMK.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/ kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Berikut program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

↳ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- ↳ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ↳ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ↳ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ↳ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ↳ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ↳ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ↳ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ↳ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ↳ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ↳ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ↳ Pengadaan Mebel
 - ↳ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ↳ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ↳ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ↳ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ↳ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ↳ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ↳ Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ↳ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ↳ Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - ↳ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - ↳ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - ↳ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - ↳ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

5. Program Pengembangan UMKM

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - ↳ Pengembangan Usaha Mikro

6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - ↳ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - ↳ Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

↳ Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

↳ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

↳ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

↳ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

↳ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

↳ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

↳ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

↳ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

↳ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

↳ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Berikut disajikan pada tabel T-C. 33 perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 9 (T-C. 33)
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL																		10,686,647,528.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11,857,493,906.00	10,815,120,634.00	10,796,580,658.14	-1,060,913,247.86							9,781,647,528.00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							11,289,285,656.00	10,069,755,084.00	10,310,474,108.14	-978,811,547.86							9,781,647,528.00		
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan				257 Koperasi	257 Koperasi	147,205,500.00	209,555,600.00	164,732,100.00	2,794,500.00							150,000,000.00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tertaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi serta Penilaian Koperasi				125 Koperasi	125 Koperasi	147,205,500.00	209,555,600.00	164,732,100.00	17,526,600.00		-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
	2.17.03.2.01.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	147,205,500.00	209,555,600.00	164,732,100.00	17,526,600.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Kesehatan Koperasi				50 Koperasi	50 Koperasi	65,087,200.00	75,886,700.00	38,596,900.00	49,912,800.00							115,000,000.00		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tertaksananya Permenkop No.17/per/M.KUKM/IX/ 2015				60 Koperasi	60 Koperasi	65,087,200.00	75,886,700.00	38,596,900.00	-26,490,300.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Penilaian Koperasi		115,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
	2.17.04.2.01.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	35,087,300.00	35,087,500.00	18,011,200.00	-17,076,100.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
	2.17.04.2.01.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																			
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	29,999,900.00	40,799,200.00	20,585,700.00	-9,414,200.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pelatihan Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi				15 Orang	15 Orang	23,550,000.00	0.00	0.00	41,450,000.00							65,000,000.00		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				120 Orang	120 Orang	23,550,000.00	0.00	0.00	-23,550,000.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
	2.17.05.2.01.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	23,550,000.00	0.00	0.00	-23,550,000.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terbinanya UMK				15 UMK	15 UMK	2,295,936,650.00	741,148,100.00	1,026,275,350.00	-2,060,936,650.00							235,000,000.00		

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro				1 Gedung Plut	1 Gedung Plut	2,295,936,650.00	741,148,100.00	1,026,275,350.00	-1,269,661,300.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	235,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	2,124,362,300.00	354,349,550.00	778,585,000.00	-1,345,777,300.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																	
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	24,362,300.00	224,362,600.00	167,081,950.00	142,719,650.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		35,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	147,212,050.00	162,435,950.00	80,608,400.00	-66,603,650.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.07.2.01.0005	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				120 Orang	120 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- PKZUKM	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		0.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
5. 2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK				15 UMK	15 UMK	724,256,250.00	897,044,390.00	872,889,290.00	-674,256,250.00						50,000,000.00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro				3 Event	3 Event	724,256,250.00	897,044,390.00	872,889,290.00	148,633,040.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Lokal	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																	
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	724,256,250.00	897,044,390.00	872,889,290.00	148,633,040.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
6. 3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8,033,250,056.00	8,146,120,294.00	8,207,980,468.14	1,133,397,472.00						9,166,647,528.00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan				12 Bulan	12 Bulan	378,640,800.00	357,956,700.00	316,804,850.00	-61,835,950.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	370,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	263,999,200.00	258,328,500.00	255,147,050.00	-8,852,150.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		250,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

3.30.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	65,000,000.00	DINAS
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	60,288,100.00	84,113,500.00	48,708,900.00	-11,579,200.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	55,000,000.00	DINAS
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	54,353,500.00	15,514,700.00	12,948,900.00	-41,404,600.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	5,563,336,437.00	5,567,574,504.00	6,174,547,882.00	611,211,445.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		4,843,825,028.00	DINAS
3.30.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	4,818,825,028.00	DINAS
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang / Bulan	33 Orang / Bulan	5,543,386,437.00	5,540,963,704.00	6,149,499,582.00	606,113,145.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	25,000,000.00	DINAS
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	19,950,000.00	26,610,800.00	25,048,300.00	5,098,300.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000.00	11,900,000.00	0.00	-90,000,000.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		150,000,000.00	DINAS
3.30.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	150,000,000.00	DINAS
		Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	90,000,000.00	11,900,000.00	0.00	-90,000,000.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	707,911,675.00	729,108,046.00	468,198,316.14	-239,713,358.86			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		975,000,000.00	DINAS
3.30.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	150,000,000.00	DINAS
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,120,600.00	15,517,900.00	13,132,300.00	-6,988,300.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	220,000,000.00	DINAS
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116,333,925.00	194,483,746.00	192,307,016.14	75,973,091.14	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	55,000,000.00	DINAS
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,575,000.00	42,718,000.00	23,160,000.00	-27,415,000.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi				PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	51,056,150.00	40,682,400.00	23,598,000.00	-27,458,150.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	15,264,000.00	15,264,000.00	15,264,000.00	0.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	454,562,000.00	420,442,000.00	200,737,000.00	-253,825,000.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			400,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah				5 Paket	5 Paket	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		1,500,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota / Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			0.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			1,500,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1,025,988,644.00	1,037,835,044.00	862,862,420.00	-163,126,224.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		982,822,500.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	169,860,000.00	181,706,400.00	180,394,800.00	10,534,800.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			56,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	856,128,644.00	856,128,644.00	682,467,620.00	-173,661,024.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			926,822,500.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	267,372,500.00	201,746,000.00	145,567,000.00	-121,805,500.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi Kinerja		345,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	5 Unit	180,000,000.00	186,116,000.00	130,297,000.00	-49,703,000.00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			195,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

3.30.01.2.09.001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	87,372,500.00	15,630,000.00	15,270,000.00	-72,102,500.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						568,208,250.00	745,365,550.00	486,106,550.00	-82,101,700.00							905,000,000.00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						568,208,250.00	745,365,550.00	486,106,550.00	-82,101,700.00							905,000,000.00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha			100 Persen	100 Persen	102,374,700.00	102,374,700.00	51,681,050.00	57,625,300.00							160,000,000.00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	44,279,500.00	44,279,500.00	22,440,550.00	-21,838,950.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi kinerja		55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.02.2.01.000	1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	44,279,500.00	44,279,500.00	22,440,550.00	-21,838,950.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang			21 Kecamatan	21 Kecamatan	7,336,800.00	7,336,800.00	3,717,000.00	-3,619,800.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Jumlah Dokumen Tanda Gudang		50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.02.2.02.000	1	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			1 Dokumen	1 Dokumen	7,336,800.00	7,336,800.00	3,717,000.00	-3,619,800.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya			5 Pasar	5 Pasar	50,758,400.00	50,758,400.00	25,523,500.00	-25,234,900.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya		55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.02.2.06.000	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya			1 Laporan	1 Laporan	50,758,400.00	50,758,400.00	25,523,500.00	-25,234,900.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Sarana pasar			4 Pasar	4 Pasar	42,420,300.00	41,370,300.00	20,871,900.00	57,579,700.00							100,000,000.00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan			35 PKL	35 PKL	42,420,300.00	41,370,300.00	20,871,900.00	-21,548,400.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.03.2.02.000	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			2 Dokumen	2 Dokumen	20,071,600.00	20,071,600.00	10,208,300.00	-9,863,300.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
3.30.03.2.02.000	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			2 Dokumen	2 Dokumen	22,348,700.00	21,298,700.00	10,663,600.00	-11,685,100.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi			50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			12 Kecamatan	12 Kecamatan	151,801,150.00	176,801,050.00	144,677,450.00	78,198,850.00						230,000,000.00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok			21 Kecamatan	21 Kecamatan	54,525,500.00	54,525,400.00	27,455,100.00	-27,070,400.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan Barang dan Kebutuhan Pokok	65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.01.0001	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			1 Laporan	1 Laporan	54,525,500.00	54,525,400.00	27,455,100.00	-27,070,400.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang			19 Kecamatan	19 Kecamatan	72,201,950.00	97,201,950.00	104,631,450.00	32,429,500.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	115,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota																
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1			1 Laporan	1 Laporan	47,302,250.00	47,302,250.00	23,824,050.00	-23,478,200.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.02.0001	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			1 Laporan	1 Laporan	24,899,700.00	49,899,700.00	80,807,400.00	55,907,700.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			7 Distributor	7 Distributor	25,073,700.00	25,073,700.00	12,590,900.00	-12,482,800.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.04.2.03.0001	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			1 Laporan	1 Laporan	25,073,700.00	25,073,700.00	12,590,900.00	-12,482,800.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan Standarisasi Peralatan Kemetrologian			100 Persen	100 Persen	202,872,900.00	355,030,300.00	223,099,650.00	147,127,100.00						350,000,000.00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian			654 UTPP	654 UTPP	202,872,900.00	355,030,300.00	223,099,650.00	20,226,750.00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Standarisasi Peralatan Kemetrologian	350,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			1300 Unit	1300 Unit	152,447,050.00	242,698,250.00	153,324,250.00	877,200.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		200,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyaluran Metrologi Legal																
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			40 Orang	40 Orang	50,425,850.00	112,332,050.00	69,775,400.00	19,349,550.00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

5,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri				2 Event	2 Event	68.739.200,00	69.789.200,00	45.776.500,00	-3.739.200,00						65.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar				3 Event	3 Event	68.739.200,00	69.789.200,00	45.776.500,00	-22.962.700,00			-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				60 UMKM	60 UMKM	68.739.200,00	69.789.200,00	45.776.500,00	-22.962.700,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
		JUMLAH							11.857.493.906,00	10.815.120.634,00	10.796.580.658,14	-1.060.913.247,86					10.686.647.528,00		

Bangkinang, Juni 2025
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
 DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR

 DR. H. E. F. ZULHAIRI, M.Si
 30304 199201 1 001

BAB V

P E N U T U P

Rencana kerja perubahan (Renja - P) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar, yang disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan bidang perdagangan, koperasi dan UMK.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ini selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Renja perubahan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, RENJA-P juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) perubahan ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

5.1. Rekomendasi

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah. Adapun rekomendasi perumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan

program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.

2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program / kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

Kaidah pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Renja perubahan Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
2. Renja Perubahan Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBDP Kabupaten Kampar Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025.
3. Semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

4. Renja Perubahan Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pembangunan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan, Koperasi dan usaha mikro mutlak diperlukan, supaya masing-masing unit kerja dapat berperan aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas secara bertanggung jawab.

Mengingat bahwa Renja menjadi panduan bagi segenap Pembina serta masyarakat terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini diharapkan dapat dibangun komitmen bersama antar seluruh jajaran internal organisasi baik di Sekretariat maupun bidang-bidang dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Bangkinang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMK KABUPATEN KAMPAR



Drs. H. ENDI ZULHAIRI, M.Si
Perdana Muda (IV/c)
NIP. 19730304 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR**

ALAMAT : JALAN LINGKAR STA (8+000) TELP. 20036 FAX. (0762) 20538

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim
Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar telah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025.

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar selama tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Mei 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR

RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710707 199603 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I	 6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	 8
 BAB IV PENUTUP	 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2025 ini menyusun Buku Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar merupakan penyempurnaan dari Rencana Kerja 2025 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. DPA Tahun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. DPA Tahun 2025 merupakan implementasi tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memberikan rumusan terhadap kebijakan dan program prioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan serta mengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Kampar tahun 2025 yang berfungsi sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan

tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja perubahan (renja perubahan) SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Kampar tahun

- 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menindaklanjuti visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan perubahan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar selama tahun 2025.
 3. Menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan I

Evaluasi Tahun 2025 sampai Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Capaian keuangan, sampai dengan bulan Maret tahun 2025 capaian keuangan sebesar 7,13 %.
- Capaian fisik sebesar 18,33 %
- Sedangkan kinerja sebesar 17,87 %

Apabila dilihat dari kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dilihat dari capaian kinerja sebesar 17,87 %.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagaimana terlampir dalam ***Format I.H*** :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada tahun 2025 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program 14 (empat belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 26.717.613.287,8 dan Anggaran pada APBD – P 2025 sebesar Rp. 32.033.623.565 sebagaimana pada Tabel 3.1.

BAB IV

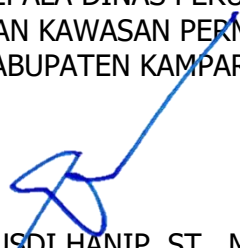
PENUTUP

Penetapan Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang Perumahan dan Permukiman. Renja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka menyiapkan infrastruktur khususnya di Perumahan dan Permukiman.

Bangkinang , Mei 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR



RUSDI HANIP. ST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710707 199603 1 003

FORMAT I.H
EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2024	Target Kinerja RENJA Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1	04					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	100 Persen	99 Persen	100 Persen	30 Persen	30 %	64.5	64.50
1	04	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen	80 %	13	54.17
1	04	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2	33.33
1	04	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	16.67
1	04	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2	33.33
1	04	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	16.67
1	04	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %	7	116.67

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2024	Target Kinerja RENJA Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	225 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	100 %	72	32.00
1	04	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	100 %	72	32.00
1	04	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2	40.00
1	04	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %	4	80.00
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 Orang	3 Orang	10 Orang	0 Orang	0 %	3	6.00
1	04	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	36 Stel	0 Stel	36 Stel	0 Stel	0 %	0	0.00
1	04	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	3 Orang	5 Orang	0 Orang	0 %	3	12.00
1	04	01	2	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3 Orang	4 Orang	2 Orang	50 %	5	20.00
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2	6.45
1	04	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2	50.00
1	04	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	5 Paket	2 Paket	40 %	6	40.00
1	04	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2	50.00
1	04	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	50 %	2	50.00
1	04	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25 %	2	50.00
1	04	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12150 Laporan	1 Laporan	225 Laporan	50 Laporan	22.222 %	51	0.42

Kode							Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2024	Target Kinerja RENJA Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)						
												Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)					
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	25	%	5		4.46
1	04	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	3	Laporan	25	%	15		31.25
1	04	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33.333	%	5		31.25
1	04	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	3	Laporan	25	%	15		31.25
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	17	Unit	7	Unit	5	Unit	2	Unit	40	%	9		52.94
1	04	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	Unit	2	Unit	1	Unit	50	%	1		50.00
1	04	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	13	Unit	5	Unit	2	Unit	40	%	2		15.38
1	04	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	0	Unit	0	%	0		0.00

[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2024	Target Kinerja RENJA Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diBawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	10 Ha	0 Ha	3 Ha	0 Unit	0 %	0	0.00
1	04	03	2	01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	25.00
1	04	03	2	01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/atau terreview serta terlegalisasi	4 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	25.00
1	04	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	4	133.33
1	04	03	2	02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	9 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	11.11
1	04	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	2	66.67
1	04	03	2	03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	33.33
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diBawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	2020 Unit	623 Unit	283 Unit	30 Unit	10.601 %	653	32.33
1	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	2020 Unit	755 Unit	3 Unit	56 Unit	1866.7 %	811	40.15

[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2024	Target Kinerja RENJA Tahun 2025 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	06				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Laporan	16 Laporan	20 Laporan	2 Laporan	10 %	18	37.50
1	04	06	2	01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Laporan	16 Laporan	20 Laporan	2 Laporan	10 %	18	37.50
1	04	06	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Laporan	16 Laporan	20 Laporan	2 Laporan	10 %	18	37.50

Bangkinang, Mei 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERI KABUPATEN KAMPAR



RUSDI HANIP, ST., MT
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710707 199603 1 003

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025
PROVINSI RIAU KABUPATEN KAMPAR

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran				Lokasi		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)				Sumber Dana		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Jenis Kog	PD Penanggung Jawab					
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						
1	04	01			Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen																		
1	04	01	2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen																		
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.01	0002	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkang Kota	Kec. Bangkang Kota	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	32,150,900	18,333,500	(13,817,400)	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	29,419,100	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.01	0003	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkang Kota	Kec. Bangkang Kota	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,492,100	22,492,100		APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,098,500	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.01	0004	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkang Kota	Kec. Bangkang Kota	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	14,229,100	7,120,150	(7,108,950)	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,993,800	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.01	0005	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkang Kota	Kec. Bangkang Kota	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,297,950	9,297,950		APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,123,000	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.01	0006	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	37,684,000	37,684,000		APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,036,750	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen																		
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	45 Orang/Bul	45 Orang/Bulan	4,280,257,799	4,280,257,799		APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Orang/Bulan	3,937,374,874	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.02	0005	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	15,300,600	9,714,600	(5,586,000)	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	14,275,700	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.02	0007	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40,750,700	33,251,750	(7,498,950)	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	40,751,000	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen																		
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.05	002	1	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Pakuan Dinas yang disediakan	100 Persen	Jumlah Pakuan Dinas yang disediakan	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	36 Stel	36 Stel	37,412,300	-	(37,412,300)								
1	04	01	2.05	009	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghimpit Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghimpit Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghimpit Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	6 Orang	6 Orang	37,450,000	16,572,000	(20,878,000)	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	37,450,000	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.05	011	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menghimpit Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menghimpit Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	6 Orang	6 Orang	107,688,900	81,815,700	(25,873,200)	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	35,688,700	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen																		
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Paket	1 Paket	5,888,500	5,888,500		APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	5,888,500	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.06	0002	2	Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Paket	1 Paket	272,672,500	272,672,500		APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	205,171,800	a	Dinas Perkim	
1	04	01	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Kab. Kampar, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	1 Paket	1 Paket	59,257,500	59,257,500		APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	59,257,500	a	Dinas Perkim	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)						Sumber Dana		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Jenis Keg	PD Penanggung Jawab				
											Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif							
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c	1/2/3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	a/b/c	1/2/3								
1	04	01	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Dihasilkan	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Dihasilkan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	29,672,400	29,672,400	-	APBD	APBD	Terdapatnya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	1 Paket	29,672,400	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dihasilkan	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dihasilkan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Dokumen	40 Dokumen	7,392,000	7,392,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	40 Dokumen	7,392,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205 Laporan	205 Laporan	437,096,000	437,096,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	205 Laporan	387,179,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			978,041,844	788,381,844	(189,660,000)	APBD	APBD	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		965,998,000		Dinas Perkim
					Sub Kegiatan																					
1	04	01	2.08	0002	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	46,728,000	46,728,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	46,728,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0003	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dihasilkan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dihasilkan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	42,990,000	42,990,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	41,490,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	100 Persen	Non ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Non ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	888,321,844	698,663,844	(189,660,000)	APBD	APBD	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	877,788,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			850,864,700	809,783,100	(41,077,600)	APBD	APBD	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		552,583,700		Dinas Perkim
					Sub Kegiatan																					
1	04	01	2.09	0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tahun yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tahun yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	196,747,000	196,747,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Unit	166,520,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	5 Unit	268,208,000	268,208,000	-	APBD	APBD	Terdapatnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	5 Unit	184,658,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	385,905,700	344,828,100	(41,077,600)	APBD	APBD	Terdapatnya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Unit	201,405,700	a	Dinas Perkim
1	04	02				Program Pengembangan Perumahan	Terdapatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100 Persen	Terdapatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,007,563,500	915,949,550	(91,613,950)	APBD	APBD	Terdapatnya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		850,831,900		Dinas Perkim
1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1 Dokumen	100,016,100	100,016,100	-	APBD	APBD	Terdapatnya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	170,015,800		Dinas Perkim
					Sub Kegiatan																					
1	04	02	2.01	0003	1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 Persen	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 Persen	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,016,100	100,016,100	-	APBD	APBD	Terdapatnya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	170,015,800	a	Dinas Perkim
1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	907,547,400	815,933,450	(91,613,950)	APBD	APBD	Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	680,816,100		Dinas Perkim
					Sub Kegiatan																					
1	04	02	2.06	0001	1	fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembaungan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 Persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembaungan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 Persen	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	599,886,100	599,886,100	-	APBD	APBD	Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	380,000,700	a	Dinas Perkim
1	04	02	2.06	0003	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	307,661,300	216,047,350	(91,613,950)	APBD	APBD	Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembaungan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	300,815,400	a	Dinas Perkim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)							Sumber Dana		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Jenis Keg	PD Penanggung Jawab		
										Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c	1/2/3				
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	20 Ha	20 Ha			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			700,000,000	700,000,000	-	APBD	APBD		650,000,000		Dinas Perkim			
1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	20 Ha	20 Ha			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	53 Dokumen	79,908,000	79,908,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	53 Dokumen	65,000,000		Dinas Perkim	
				Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.01	0001	1	1	1	1	1	Kab. Kampar	Kab. Kampar	1 Dokumen	1 Dokumen	79,908,000	79,908,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	1 Dokumen	65,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang terbita	20 Ha	20 Ha			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen		495,365,000	495,365,000	-	APBD	APBD		275,000,000		Dinas Perkim	
				Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.02	0008	4	4	4	4	4	Kab. Kampar	Kab. Kampar	3 Dokumen	3 Dokumen	495,365,000	495,365,000	-	APBD	APBD	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	275,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang terbita	20 Ha	20 Ha			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	124,727,000	124,727,000	-	APBD	APBD	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	310,000,000		Dinas Perkim
				Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.03	0013	1	1	1	1	1	Kab. Kampar	Kab. Kampar	2 Ha	2 Ha	124,727,000	124,727,000	-	APBD	APBD	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	310,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6,685,014,200	9,230,275,600	2,545,261,400	APBD dan BANKSW		3,900,000,000		Dinas Perkim		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditanggalkan	330 Unit	330 Unit			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 Unit	330 Unit	6,685,014,200	9,230,275,600	2,545,261,400	APBD dan BANKSW	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun	330 Unit	3,900,000,000		Dinas Perkim	
				Sub Kegiatan																				
1	04	04	2.01	0001	1	1	1	1	1	Kab. Kampar	Kab. Kampar	330 Unit	330 Unit	6,179,170,100	7,158,076,350	978,906,250	APBD	APBD	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi	330 Unit	1,900,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	04	2.01	0004	2	2	2	2	2	Kab. Kampar	Kab. Kampar	3 Unit	10 Unit	505,844,100	2,072,199,250	1,566,355,150	APBD dan BANKSW	APBD dan BANKSW	Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun		2,000,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	42.78 Persen	42.78 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,870,365,755	14,081,640,982	3,211,275,227	APBD	APBD		1,840,000,000		Dinas Perkim	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	50 Lokasi	50 Lokasi			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Lokasi	50 Lokasi	10,870,365,755	14,081,640,982	3,211,275,227	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	50 Lokasi	1,840,000,000		Dinas Perkim
				Sub Kegiatan																				
1	04	05	2.01	0001	1	1	1	1	1	Kab. Kampar	Kab. Kampar	2 Dokumen	2 Dokumen	112,449,600	84,221,000	(28,228,600)	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	2 Dokumen	100,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	05	2.01	0002	2	2	2	2	2	Kab. Kampar	Kab. Kampar	50 Lokasi	50 Lokasi	10,276,246,655	13,552,772,682	3,276,526,027	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	20 Lokasi	1,340,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	05	2.01	0003	3	3	3	3	3	Kab. Kampar	Kab. Kampar	50 Laporan	50 Laporan	114,019,800	76,997,600	(37,022,200)	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	30 Laporan	50,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	05	2.01	0004	4	4	4	4	4	Kab. Kampar	Kab. Kampar	50 Laporan	50 Laporan	367,649,700	367,649,700	-	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	10 Laporan	250,000,000	a	Dinas Perkim	
1	04	06			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 Persen	100 Persen			Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			179,074,050	179,074,050	-	998	998		150,000,000		Dinas Perkim	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				Jenis Keg	PD Penanggung Jawab		
										Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1					2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16		17	a/b/c	1/2/3		
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Tertelaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100 Persen		Tertelaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100 Persen	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Laporan	40 Laporan	179,074,050	179,074,050	-	APBD	APBD	Tertelaksananya sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4 Laporan	150,000,000			Dinas Perkim		
					Sub Kegiatan																						
1	04	06	2.01	0001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	179,074,050	179,074,050	-	APBD	APBD	Tertelaksananya sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20 Laporan	150,000,000	a		Dinas Perkim

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR


RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710707 199603 1 003